



VOLUME XIII / NO. 129 / JUNI 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



BERINVESTASI MEMBANGUN NEGERI

Merancang masa depan bisa dimulai dengan berinvestasi sejak dini. Berinvestasi pada surat berharga negara, berarti ikut membiayai pembangunan negeri lewat kantong sendiri.

Daftar Isi



- 5 DARI LAPANGAN BANTENG
- 6 EKSPOSUR
- 10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 15 Berinvestasi untuk Negeri
- 18 Infografis
- 20 Menentramkan Hati Membangun Negeri
- 23 e-SBN Mudahkan Investasi
- 25 SBN Ritel: Investasi Aman dengan Fitur Luar Biasa

WAWANCARA

- 27 Istiqlal: Simbol Islam Berkeindonesiaan

POTRET KANTOR

- 30 Direktorat Pengelola Risiko Keuangan Negara

FIGUR

- 32 Semangat Berbakti Untuk Ibu Pertiwi

EKONOMI TERKINI

- 36 Kelola Sistem Keuangan Hadapi Turbulensi

KOLOM EKONOM

- 40 Zakat Bisa Jadi Solusi

GENERASI EMAS

- 44 Cita Tinggi Tentara RI

OPINI

- 46 Revolusi Industri 4.0 pada SDM Sektor Publik

REGULASI

- 48 Wajah Baru Tax Holiday

INSPIRASI

- 50 Menumbuhkan Cita-Cita

RENUNGAN

- 52 Ramadan Mengajarkan

Buku

- 53 Saatnya Optimisme Menjadi Dosis Harian

JALAN-JALAN

- 54 Menghapus Penat di Pulo Cinta

SELEBRITI

- 56 Membangun Karakter Lewat Komik

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Riva Setiara, Adya Asmara Muda, Hadi Suroho, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Hadi Suroho, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhsinin. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Prihariyanto, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Arif Setiawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, . **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

Menuju **ASIAN GAMES 2018** Jakarta - Palembang, 18 Agustus - 2 September 2018

Dari Lapangan Banteng

Investasi Membangun Negeri

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahunnya, pemerintah menetapkan besaran belanja negara untuk kepentingan masyarakat. Belanja negara diantaranya untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Kebutuhan belanja ini sudah pasti, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan akan dilaksanakan pada tahun yang berjalan. Di lain sisi, pemerintah juga telah merencanakan pendapatan negara melalui sektor pajak dan nonpajak. Namun, penerimaan negara besarnya tidak pasti, sangat tergantung pada geliat ekonomi nasional dan internasional. Saat jumlah belanja negara lebih besar dari penerimaan negara akan terjadi defisit, sehingga diperlukan instrumen pembiayaan untuk menutupi kebutuhan di tahun tersebut.

Instrumen pembiayaan bisa didapatkan dari pinjaman melalui lembaga

keuangan internasional atau penerbitan surat utang negara/obligasi. Salah satu bentuk obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Disebut ritel karena obligasi ini dapat dibeli oleh masyarakat umum melalui agen penjualan yang telah ditetapkan. Selain sebagai alternatif pembiayaan negara, SBN Ritel ini juga menjadi opsi bagi masyarakat untuk berinvestasi. Opsi investasi ini hasilnya lebih pasti, karena pembayaran bunga/ imbalan dan pelunasan/pembelian sepenuhnya dijamin oleh pemerintah.

Untuk lebih menjangkau masyarakat Indonesia, pada bulan Mei 2018, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjual SBN Ritel secara *online* atau disebut juga e-SBN. Selain penjualannya dapat diakses secara *online*, nilai minimum penjualannya juga diturunkan dari Rp5 juta menjadi Rp1 juta. Bunga yang ditawarkan juga lebih besar daripada deposito perbankan. e-SBN ini ditujukan untuk menarik lebih banyak

investor ritel, terutama kaum milenial yang mempunyai penghasilan menengah dan ingin berinvestasi.

Bagi pemerintah, keikutsertaan kaum milenial untuk investasi sangat penting, agar ada kesadaran dalam memahami instrumen APBN secara keseluruhan. Generasi muda sebagai penerus tongkat estafet pembangunan Republik Indonesia di masa yang akan datang, diharapkan dapat meleak APBN. Sehingga dapat peduli, paham, dan turut mengawasi APBN. Pada saatnya nanti, ketika generasi milenial sudah memegang tongkat estafet perjuangan pendiri bangsa ini, pengelolaan keuangan negara dari sisi belanja, pendapatan, dan pembiayaan diharapkan dapat dikelola dan diawasi secara profesional.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Berkontribusi membangun negeri dengan berinvestasi melalui #SBR003 menarik, bukan? Jelaskan alasan ketertarikanmu dengan menjawab di kolom komentar disertai tagar #OpiniAnda #MediaKeuangan

@Lukiantorofdn
Menarik bagi saya, anak muda berusia 22 tahun untuk tau investasi. Kalau ngomongin investasi pasti melulu soal berani akan resiko. Resiko itu selalu ada, tapi ketika melihat produk investasi #SBR003 membantu membantah keraguan saya selama ini. Jadi, investasi

#SBR003 jaminannya kuat, cenderung lebih stabil, saya juga aman akan resiko, tapi juga pengembaliannya bisa diminta diawal tempo juga. Bisa berpikir masa depan, hari ini dulu.

@ev4S_
Hari ini ke bank utk membeli #SBR003, walau dokumen yang

diisi banyak banget & harus ke Bdg dari Cimahi. Alasan membeli adalah ingin berkontribusi terhadap negara, aman, bunga di atas deposito & dijamin 100% oleh pemerintah. Kalo bukan kita siapa lagi?

@BCTemas
#MasTanjung ikutan ahh Minkeu Kenapa

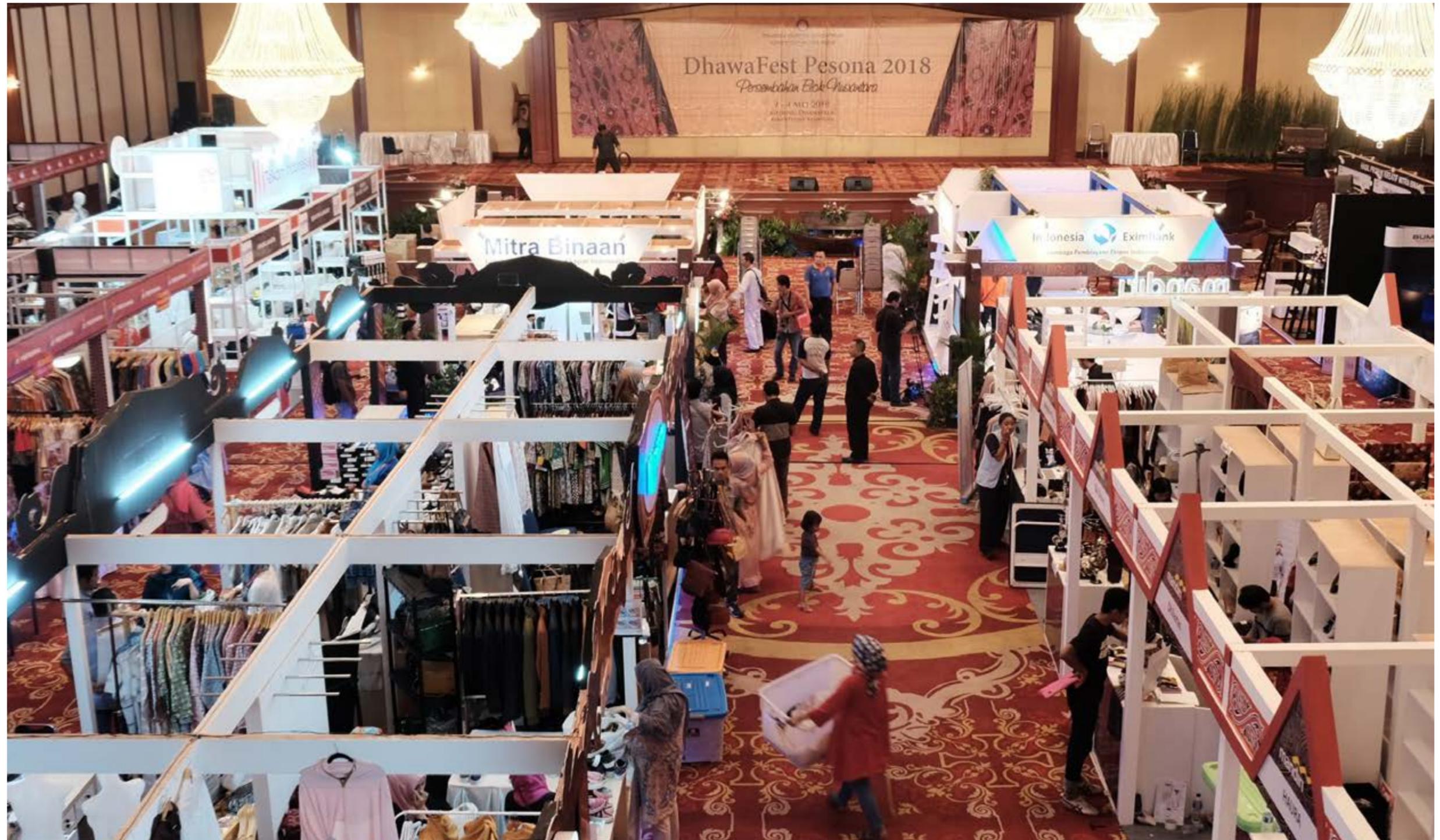
menarik? karna.. selain berkontribusi kpd Negara sbg bentuk pengabdian pada Ibu Pertiwi, kita juga menambah Pundi-pundi Keuangan sendiri. Daripada Negara hutang ke Luar Negeri lebih baik hutang ke Warga-nya sendiri.



Dhawa Festival

Dhawafest Pesona 2018 diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1439 H serta memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bazar menjadi kegiatan utama dalam penyelenggaraan acara tersebut yang diikuti oleh 199 stan UMKM binaan dari instansi, lembaga, BUMN dan masyarakat umum. Ragam produk yang dipamerkan antara lain kain batik, kain tenun dari berbagai daerah di Indonesia, aksesoris, kerajinan khas lokal, serta berbagai makanan khas Indonesia. Agenda tahunan ini diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Keuangan.

Foto
Resha Aditya
Pratama





Moto GP Ala Bali



Makepung merupakan atraksi tradisi balap kerbau yang berasal dari Kabupaten Jembrana, Bali. Sepasang kerbau yang dihiasi kepalanya dengan semacam mahkota harus menarik sebuah gerobak. Awalnya, tradisi ini hanyalah semacam permainan mengadu lari kerbau para petani Jembrana Bali. Kini, tradisi tersebut masuk dalam agenda tahunan wisata di Bali yang dikelola secara profesional. Makepung di Jembrana biasanya dilaksanakan setiap hari Minggu pada bulan Juni - Oktober.

Foto dan teks
Arief Kuswanadji



17/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan para pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan menyampaikan realisasi APBN hingga 30 April 2018 pada Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Mei di Aula Djuanda Kementerian Keuangan pada Kamis (17/05). Menkeu menyebutkan bahwa saat ini volatilitas di sektor keuangan global masih relatif tinggi. Meskipun demikian, dalam gejolak ekonomi yang terjadi itu perekonomian Indonesia masih memiliki fundamental yang kuat.

Menkeu mengungkapkan, perubahan kebijakan di Amerika Serikat (AS) baik di sektor keuangan maupun di bidang perdagangan menjadi penyebab utama gejolak tersebut. "Kebijakan moneter dari *Federal Reserve* yang meningkatkan suku bunga dianggap sebagai suatu level normal yang baru, maupun kebijakan di bidang perdagangan di Amerika Serikat dan Tiongkok menimbulkan sentimen eskalasi dari ketegangan hubungan dagang antara Amerika dengan Tiongkok maupun dengan berbagai negara lain," jelasnya. Dampak yang terjadi adalah depresiasi mata uang negara-negara di dunia terhadap dollar AS. Menkeu mencontohkan mata uang Eropa yang mengalami depresiasi 1 %, yaitu Rusia 9%, Brazil 9%, dan Filipina 4%. "Rupiah kita dalam hal ini juga mengalami depresiasi meskipun dalam tingkat yang lebih rendah yaitu sampai dengan 9 Mei 3,88% dibandingkan posisi akhir tahun 2017. Kalau dibandingkan pada tahun 2017 Rupiah terdepresiasi sekitar 2% dari Rp13,384 ke Rp13,655 per dollar AS," terangnya.

Meskipun demikian, dalam gejolak tersebut perekonomian Indonesia masih memiliki fundamental yang kuat. Perekonomian Indonesia pada triwulan I tumbuh 5,06%, lebih tinggi dibanding kinerja pada triwulan I 2017 sebesar 5,01%. Pertumbuhan ini ditopang oleh 3 komponen yang mengalami penguatan yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan investasi.

Selain itu, Menurut Menkeu, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 mengenai pembaruan sistem administrasi perpajakan. Perpres tersebut semakin memperkuat reformasi di bidang perpajakan yang salah satu pilarnya adalah memperkuat institusi perpajakan termasuk organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), bisnis proses dan sistem informasi. "Oleh karena itu, kita dalam hal ini dengan adanya Perpres No 40 akan memiliki landasan yang makin kuat untuk menjalankan reformasi perpajakan secara kredibel, konsisten dan tentu saja dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat tujuannya adalah agar institusi perpajakan kita menjadi kuat, kredibel, akuntabel dan memiliki bisnis proses yang efektif dan efisien," jelas Menkeu. Tujuan lainnya adalah untuk membangun sinergi yang optimal antar berbagai lembaga. Selain itu, kepatuhan wajib pajak diharapkan menjadi makin baik dan penerimaan negara juga akan meningkat.

26/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



RUU AFAS Resmi Disahkan oleh DPR

Rancangan Undang-Undang (RUU) Protokol ke-6 Jasa Keuangan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) resmi disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-23 DPR. Protokol ke-6 Jasa Keuangan AFAS merupakan tahapan kerja sama pembukaan akses pasar jasa keuangan ASEAN. "Izinkan saya, atas nama Pemerintah untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati atas disahkannya RUU ini. Pemerintah menyambut baik berbagai pandangan dari DPR. Kami siap melakukan konsultasi yang diperlukan," Ujar Menkeu pada sambutannya di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (26/04). Saat ini, masih sangat sedikit perbankan nasional yang memiliki kantor cabang atau unit usaha di luar negeri dikarenakan berbagai syarat dan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, dengan disahkannya AFAS sebagai Undang-Undang, membuka kesempatan perbankan Indonesia untuk *go international*.



02/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Penyerahan Hasil Lelang dan Penjualan Sukarela Koleksi Pribadi Pejabat Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghimbau kepada masyarakat agar mulai menggunakan mekanisme lelang baik untuk kepentingan komersial maupun kegiatan sosial. Hal ini disampaikan Menkeu pada acara "Penyerahan Hasil Lelang dan Penjualan Sukarela Koleksi Pribadi Ibu Negara, Wakil Presiden dan Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, Beberapa Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Lainnya" bertempat di Gedung Yusuf Anwar, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (02/05). "Tentu saya berharap bahwa kegiatan berhubungan dengan lelang ini akan terus bisa dikenalkan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Saya rasa dengan adanya munculnya kemarin lelang yang cukup memberikan berita sekarang mulai ada ketertarikan masyarakat untuk melakukan (lelang)," kata Menkeu.

30/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Konferensi Pers KSSK pada Triwulan I Tahun 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (Ketua DK LPS) Halim Alamsyah sebagai tim Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa sistem keuangan Indonesia dalam kondisi stabil dan terkendali pada triwulan I tahun 2018. Tim KSSK menyampaikan hal tersebut pada acara Konferensi Pers KSSK, Senin, (30/04) di Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih, Jakarta. "Sistem keuangan yang stabil dan terkendali tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat, kinerja lembaga keuangan yang membaik, serta kinerja emiten di pasar modal yang stabil," ujar Menkeu.



Menkeu Membuka Rapat Kerja Pimpinan Inspektorat Jenderal

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa auditor internal perlu terus menjaga profesionalismenya dengan mencontoh tidak hanya sistem di dalam negeri tetapi juga yang dianut sistem global. Hal ini disampaikan dalam rangkaian acara Pembukaan Rapat Kerja Pimpinan Tengah Tahun 2018 (Rakerpim) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan pada Rabu (02/05). “Jadi artinya adalah penekanan Anda sudah profesional dan profesionalism (itu) perlu di-sustain dengan terus melakukan *benchmarking* terhadap apa yang kita lakukan di sini, dengan banyak internal auditor di seluruh dunia tidak hanya di Indonesia,” pesan Menkeu. Di Indonesia, Kementerian Keuangan adalah pembina dari internal auditor seluruh Indonesia, sehingga apabila Itjen tidak melakukan pembinaan secara baik maka dapat berpengaruh terhadap kualitas auditor yang dibina.



02/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

07/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Menkeu Memberikan Keynote Speech Welcoming Alumni Penerima Beasiswa LPDP 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan para alumni penerima beasiswa LPDP untuk pantang menyerah dalam memperjuangkan cita-citanya dan menjadikan langit sebagai batasnya. Hal tersebut disampaikan dalam acara *Welcoming Alumni* Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2018 dengan tema ‘Alumni Untuk Negeri’ di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (07/05). “Kalau Anda punya kemauan, kalau Anda punya cita-cita, kalau Anda punya suatu keinginan, maka jadikanlah *the sky is your limit*. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mudah berputus asa pada saat berjuang mencapai cita-cita Anda,” pesannya. Ia merasa bangga dengan misi LPDP untuk menjadikan para alumni penerima beasiswa sebagai bagian dari solusi memecahkan berbagai permasalahan bangsa Indonesia.

09/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menteri Keuangan Diapresiasi Sebagai Penggerak Ekonomi Digital

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendapatkan apresiasi sebagai salah satu tokoh penggerak ekonomi digital dari Kata Data, sebuah perusahaan media online dan riset di bidang ekonomi dan bisnis. Penghargaan diberikan pada acara ulang tahun Kata Data ke-6 yang mengusung tema “Transformasi Indonesia Menuju Raksasa Ekonomi Digital” di Jakarta pada Selasa (09/05). Menkeu memperoleh apresiasi tersebut berdasarkan lima pertimbangan. Pertama, memberikan insentif dan kemudahan perpajakan bagi pelaku industri digital. Kedua, mengalokasikan anggaran pembangunan jaringan pita lebar di Indonesia. Ketiga, meningkatkan anggaran pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar mengikuti perkembangan teknologi. Keempat, Menkeu dinilai responsif terhadap kemajuan ekonomi digital, termasuk aktif mengajak birokrat melek teknologi. Kelima, progresif dalam komunikasi publik melalui platform baru media sosial, seperti Vlog, Facebook Live, dan InstaStory.



11/05

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

Orasi Ilmiah Menkeu pada Dies Natalis ke-59 Universitas Tanjungpura

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-59 Universitas Tanjungpura di Auditorium Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat (11/05). Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia akan terus melakukan reformasi untuk menghadapi guncangan perekonomian global akibat pengaruh suasana geopolitis saat ini. “Kita dihadapkan pada guncangan-guncangan yang sifatnya regional maupun Global. Untuk itu Indonesia akan terus melakukan reformasi,” tegas Menkeu. Menkeu berharap dengan berbagai perundang-undangan kita mampu membangun Indonesia yang lebih luas. Tujuan desentralisasi untuk mendekatkan akuntabilitas dari pemerintahan daerah kepada rakyat, sehingga mampu melayani, memahami aspirasi rakyatnya dan merespon dengan pelayanan, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

11/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Menjadi Narasumber Talkshow Interaktif We The Youth

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir dalam acara talkshow interaktif bertajuk *We The Youth* di Epicentrum XII Kuningan Jakarta pada Sabtu (11/05). Dalam kesempatan itu Menkeu membahas tema “Kemana Uang Kita?” kepada para peserta yang hadir yang mayoritas adalah generasi milenial. Bersama aktor Reza Rahadian, Menkeu membicarakan mulai dari pengelolaan keuangan negara hingga pajak dan bea cukai. Selain itu, Menkeu berdiskusi mengenai peran anak muda dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kalau anak muda sekarang *kan* nabung untuk *traveling*, kalau saya tetap memberi nasehat *traveling* di dalam negeri aja, supaya kontribusi (pajak retribusi) ke negara banyak, kalau anda *traveling* ke Jepang atau Bangkok, ya yang maju disana. Kita ke Raja ampat, Labuan Bajo, Dieng bagus-bagus kok disana,” kata Menkeu dalam menjawab peran anak muda dalam perekonomian.





Meski berbiaya tinggi, pembangunan infrastruktur dapat diperoleh manfaatnya hingga berpuluh tahun kemudian.

Foto
Langgeng
Wahyu P.

BERINVESTASI UNTUK NEGERI

Layaknya rumah tangga, setiap negara memiliki alokasi belanja yang perlu dianggarkan. Namun, keterbatasan pada anggaran pendapatan, tidak serta merta membuat pemerintah menghentikan belanja negara yang bersifat krusial. Hal ini terutama, pada belanja yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya.

Kebijakan anggaran defisit hingga kini masih menjadi pilihan pemerintah. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Meski demikian, pemerintah terus mencari cara agar pembiayaan dalam menutup defisit anggaran bisa berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Mereka yang secara sadar, bersedia menginvestasikan uangnya demi membangun negeri.

Kebutuhan krusial

Saat ini, Indonesia masih memiliki ketertinggalan pembangunan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Terkait hal ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman menyampaikan alasan mengapa kedua bidang pembangunan ini jadi konsen pemerintah saat ini.

“Ketertinggalan Indonesia (yang) pertama adalah di bidang infrastruktur. Berbagai macam survey menunjukkan bahwa infrastruktur *gap* kita (Indonesia dengan negara lain) itu luar biasa besarnya. Kedua, kita tahu bahwa kunci kompetisi ke depan adalah pada SDM,” terang Luky.

Tidak dapat dipungkiri, luas wilayah yang begitu besar memang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Ketimpangan pada pembangunan di pelosok negeri, serta keterbatasan pada akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, menjadi pekerjaan besar yang perlu diselesaikan segera.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur hingga ke seluruh penjuru negeri jadi fokus pemerintah saat ini. Meski berbiaya tinggi, pembangunan infrastruktur dapat diperoleh manfaatnya hingga berpuluh tahun kemudian. Utamanya, agar setiap masyarakat Indonesia bisa melakukan mobilitas dengan biaya seefisien mungkin, sehingga memperoleh kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berkembang.

Sementara itu, berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mayoritas penduduk Indonesia berada pada rentang usia anak-anak (0-14 tahun) dan usia produktif (15-65 tahun). Pada 2018, jumlahnya ditaksir mencapai 249,62 juta jiwa atau 94,2 persen dari total populasi.

Banyaknya populasi di kedua rentang usia ini mengindikasikan kebutuhan Indonesia untuk menginvestasikan dana pada bidang pendidikan dan kesehatan. Terlebih lagi, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih jauh dari harapan. Saat ini, angka IPM Indonesia berada di kisaran 70. Berada di bawah negara-negara lain yang telah mencapai angka 73.

Terkait hal ini, pemerintah terus berupaya memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 5 persen dari total belanja di APBN. Harapannya, terwujud SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

Pembiayaan jadi jawaban

Keterbatasan pada anggaran pendapatan tentu tidak bisa menjustifikasi pemerintah untuk menahan belanja yang bersifat prioritas. Meski berbiaya mahal, ketertinggalan pada infrastruktur dan kualitas SDM perlu diselesaikan segera. Defisit

Pendidikan diperlukan untuk mewujudkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Foto
Anas Nur Huda



anggaran yang berimplikasi pada pembiayaan melalui utang merupakan hal yang harus dihadapi pemerintah saat ini.

Di sinilah pembiayaan mengambil peran dalam menutup defisit anggaran yang terjadi. Meski demikian, pemerintah terus memastikan bahwa defisit anggaran berada dalam batas aman dan terkendali. Oleh karena itu, pemerintah terus mencari cara untuk mengembangkan pembiayaan yang inovatif, kreatif, efisien, dan berkelanjutan.

“Hal yang paling penting dilakukan adalah bagaimana agar utang dikelola dengan baik dan dalam batas aman,” kata Luky. Dalam berutang, lanjut Luky, pemerintah melihat dua hal penting. Pertama, pinjaman tersebut memiliki risiko yang terkontrol. Kedua, bunga atas pinjaman yang harus dibayar diutamakan yang serendah mungkin.

Pinjaman dan SBN

Terdapat sedikitnya dua cara yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh utang. “Pertama, kita bisa mengambil dari pinjaman, baik multilateral maupun bilateral. Kedua, melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN),” jelas Luky. Dari kedua cara itu, 81 persen utang berasal dari SBN dalam bentuk obligasi negara, sedangkan sisanya sebanyak 19 persen dalam bentuk pinjaman.

Besarnya komposisi SBN

dibandingkan pinjaman luar negeri yang dilakukan pemerintah, bukan tanpa alasan. Adanya ketentuan-ketentuan tertentu dalam pinjaman luar negeri yang diterapkan oleh negara pendonor, membuat pemerintah lebih menyukai pembiayaan melalui surat utang (SBN). Sementara pinjaman luar negeri dilakukan hanya pada sektor-sektor tertentu.

Mengenal SBN

Saat ini, pemerintah menerbitkan dua jenis SBN, yaitu SBN konvensional atau yang biasa disebut surat utang negara (SUN) dan SBN syariah atau dikenal dengan surat berharga syariah negara (SBSN). Baik SUN maupun SBSN, keduanya memiliki ragam yang diperuntukkan bagi investor ritel maupun investor institusi.

Bagi investor institusi, SUN menyediakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau dikenal sebagai *treasury bills* dan obligasi negara (ON) atau disebut *treasury bonds*. Sementara SBSN menyediakan Islamic Fixed Rate (IFR), SPN Syariah, Sukuk Dana Haji Indonesia, serta Project Based Sukuk bagi investor institusi.

Selanjutnya, bagi investor ritel, SUN menyediakan obligasi negara ritel (ORI) dan Saving Bond Ritel (SBR). Sementara SBSN menyediakan sukuk ritel dan sukuk tabungan.

Bagi masyarakat Indonesia yang ingin membeli SBN ritel guna diperjualbelikan

di pasar sekunder, dapat berinvestasi pada ORI dan sukuk ritel. Kedua SBN ini memiliki nominal paling kecil Rp5 juta dengan kupon yang bersifat tetap (*fixed*) dan dibayarkan tiap bulan.

Sementara itu, bagi WNI yang ingin memiliki SBN yang tidak untuk diperjualbelikan, maka SBR dan sukuk tabungan bisa jadi alternatif pilihan. Bedanya, SBR memiliki nominal paling kecil Rp5 juta, sedangkan sukuk tabungan bernominal minimal Rp2 juta. Selain itu, kupon SBR bersifat mengambang mengikuti *LPS rate* (kecuali SBR013) dengan batas kupon minimal (*floating with floor*), sedangkan kupon sukuk tabungan bersifat tetap (*fixed*). Meski tidak bisa diperdagangkan, kedua SBN ini memiliki fasilitas *early redemption*.

Keunggulan investasi

SBN telah memegang peran yang begitu penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagai instrumen fiskal, SBN diharapkan bisa menggali potensi sumber pembiayaan APBN dari investor pasar modal. Terlebih lagi, penerbitan SBN saat ini digunakan pemerintah untuk program dan kegiatan yang produktif, serta yang memiliki dampak lanjutan bagi perekonomian.

Selanjutnya bagi masyarakat, SBN ritel hadir sebagai alternatif investasi yang aman dengan mengeliminasi risiko gagal bayar. Hal ini dikarenakan pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh pemerintah. Dalam mengelola SBN, pemerintah melakukannya secara profesional, terbukti tidak ditemukannya kegagalan pemerintah dalam membayar obligasi jatuh tempo maupun bunga dan imbalan.

Perluas basis investor

Menyadari pentingnya pengembangan pasar SBN, pemerintah melakukan diversifikasi pada basis investor. Hal ini dilakukan guna mengefisienkan biaya dengan risiko yang lebih terkendali. Saat ini, pemerintah tengah gencar mengembangkan basis investor ritel yang merupakan WNI.

Besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi keunggulan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa mengembangkan basis investor ritel. Jumlah yang potensial ini hendak didorong agar menuju masyarakat yang sadar berinvestasi, disamping

sekadar masyarakat yang sadar menabung.

“Kita ingin mendidik dan mendorong masyarakat untuk lebih banyak berinvestasi, bukan hanya sekedar menabung,” harap Luky. Keunggulan SBN sebagai instrumen investasi yang tidak dimiliki instrumen lain, menurut Luky, adalah bahwa dengan berinvestasi SBN, masyarakat tengah ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.

SBN ritel online

Untuk itu pula, pemerintah tengah melakukan pendalaman pasar guna merangkul investor ritel domestik lebih banyak lagi. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Pengembangan Pasar Keuangan, Nanang Hendarsah menyampaikan, dengan penyebaran konsentrasi kepemilikan SBN ritel diharapkan mampu mendukung inklusi keuangan.

Menurut Nanang, data dari Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) menunjukkan, komposisi kepemilikan SBN ritel masih dikuasai investor DKI Jakarta. “Investor dari DKI Jakarta mencapai sekitar 42 persen, wilayah Indonesia Barat selain DKI Jakarta mencapai sekitar 50 persen. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, jumlah volume pemesanan hanya sekitar 8 persen,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) bersama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam FK-PPPK telah memasukkan

pengembangan SBN ritel ke dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan. Sementara BI sendiri turut memberi dukungan dalam bentuk sistem *settlement* melalui BI-SSSS, serta sosialisasi kepada masyarakat dalam kerangka FK-PPPK.

Inovasi yang tengah dijalankan pemerintah dalam penjualan SBR003 melalui *platform online* baru-baru ini diharapkan memperoleh sambutan baik dari masyarakat. Melalui *platform online*, masyarakat dapat melakukan pembelian SBN dimanapun dan kapanpun selama masa penawaran pada 14-25 Mei 2018.

Menanggapi hal ini, ekonom Citi Indonesia, Helmi Arman meyambut baik hal ini. Menurutnya, selain memperluas jangkauan SBN, keingintahuan publik terhadap SBN dan pembiayaan semakin meningkat sehingga bisa memperluas proses pengawasan atas pembiayaan negara. Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan pasar obligasi korporasi.

“Bila siklus ekonomi sudah kembali pulih, kebutuhan pembiayaan sektor swasta, baik bank maupun nonbank akan bergerak naik. Diharapkan kebutuhan pendanaan pemerintah, untuk infrastruktur dan sebagainya, sudah mulai berkurang sehingga tidak terjadi persaingan menggalang dana antara pemerintah dan swasta, yang biasa disebut *crowding out*,” jelas Helmi.

Teks Farida Rosadi

MEMBANGUN NEGERI DENGAN SBN

Pemerintah menjaga orientasi tujuan pembangunan bangsa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menggunakan beragam jenis instrumen keuangan negara yang ditawarkan kepada publik sebagai alat pemenuhan kebutuhan pembangunan tersebut. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) secara online atau e-SBN. Simplifikasi penerbitan e-SBN seri SBR003 melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi pemerintah untuk menarik investor dari semua kalangan.

INSTRUMEN INVESTASI SBN UNTUK INVESTOR RITEL

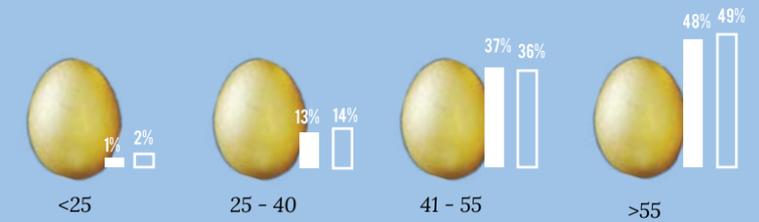
	ORI	SBR	SUKUK RITEL
Tenor	3 Tahun	2 Tahun	3 Tahun
Pembelian Minimal	Rp5 Juta	Rp1 juta	Rp5 juta
Pembelian Maksimal	Rp3 Miliar	Rp3 Miliar	Rp5 Miliar
Tradability	Dapat diperdagangkan setelah Minimum Holding Period Berakhir	Tidak Dapat Diperdagangkan	Dapat diperdagangkan setelah Minimum Holding Period Berakhir
Fitur	-	Early Redemption setelah 12 bulan dengan minimum holding 50%	-
Kupon	Fixed Rate	Floating Rate (dengan floor LPS rate + spread)	Fixed Rate

TREN BESARAN TINGKAT KUPON SBR (PER 3 BULAN)

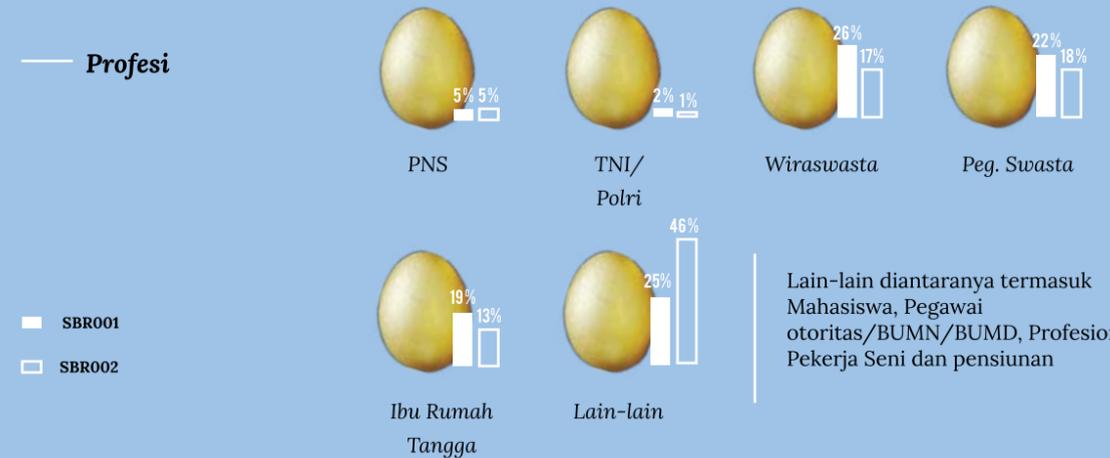


PEMBELI POTENSIAL

Kelompok usia (tahun)



Profesi



Lain-lain diantaranya termasuk Mahasiswa, Pegawai otoritas/BUMN/BUMD, Profesional, Pekerja Seni dan pensiunan

KEUNTUNGAN DAN RISIKO SBR

Keuntungan

- Dijamin oleh Undang-undang
- Kupon dibayarkan tiap bulan
- Kupon mengikuti perkembangan BI 7-Day Reverse Repo Rate, Jaminan kupon minimal (floor) sampai dengan jatuh tempo
- Dapat Dijaminkan kepada pihak lain
- Kemudahan akses
- Turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional

Risiko

- **Risiko Gagal Bayar**
SBR bebas risiko gagal bayar
- **Risiko Tingkat Bunga**
SBR bebas risiko tingkat bunga karena nilai pokok tidak berubah, kuponnya mengambang mengikuti BI 7-Day Reverse Repo Rate dan memiliki floor rate sampai jatuh tempo.
- **Risiko Likuiditas**
SBR tidak likuid karena tidak diperdagangkan, namun terdapat fasilitas early redemption

MENENTRAMKAN HATI MEMBANGUN NEGERI

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup baik. Begitu pula halnya dengan posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global yang semakin diakui terutama di antara negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) dan Asia. Indonesia saat ini juga berhasil menempati posisi ketujuh dalam *top 10 Islamic Finance Asset* dengan total aset sebesar USD81,84 miliar atau meningkat dari posisi tahun sebelumnya di posisi kesembilan. Pada tahun 2017, industri keuangan syariah Indonesia berhasil mengalami pertumbuhan sebesar 26,97 persen.

Melihat potensi yang besar tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) melakukan diversifikasi pembiayaan APBN yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai alternatif instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang konvensional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, SBN dengan prinsip syariah ini disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau lebih dikenal dengan nama Sukuk Negara.

UU SBSN tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pengelolaan Sukuk Negara secara hati-hati, transparan, dan akuntabel sekaligus sebagai dasar kepastian hukum bagi investor. UU SBSN tersebut juga menjadi tonggak sejarah kelahiran Sukuk Negara yang kemudian diikuti dengan pengembangan berkesinambungan melalui berbagai inovasi. Di sisi lain, Sukuk Negara menjadi instrumen investasi yang dapat pula turut menggerakkan pasar modal syariah di Indonesia. Lebih jauh lagi, investasi di Sukuk Negara membuka pintu bagi warga negara Indonesia untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan negara.

Dalam diskusi silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Aula Kantor MUI pada tanggal 22 Mei 2018 yang lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan perkembangan SBSN sejak awal diterbitkan pada tahun 2008 yang membukukan dana Rp4,7 triliun hingga kini yang sudah mencapai angka Rp884,3 triliun. Selain itu, Menkeu juga menerangkan bahwa Sukuk sudah menjadikan berbagai proyek pembangunan di Indonesia sebagai salah satu aset penjaminnya (*underlying asset*).

"Beberapa proyek (yang dibiayai dari sukuk, antara lain berupa) jalan dan jembatan di 30 provinsi, pembangunan kereta di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, revitalisasi asrama haji di 24 (kota), serta 54 Perguruan Tinggi dan 32 madrasah," jelas Menkeu kepada Dewan Pimpinan dan Pengurus MUI.

Diversifikasi pembiayaan

Penerbitan Sukuk Negara, yang dimulai sejak tahun 2008, merupakan salah satu wujud dukungan dan peran serta Pemerintah dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Menurut

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Luky Alfirman, kehadiran Sukuk Negara mampu memperkaya jenis instrumen pembiayaan APBN dan pembangunan proyek di tanah air, sekaligus menyediakan instrumen investasi dan likuiditas bagi investor institusi maupun individu, termasuk untuk inklusi keuangan. Di samping itu, penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional juga menandai eksistensi serta mengokohkan posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global.

"Kita ini adalah *the largest moslem country*. Kita mayoritas penduduk muslim maka minat untuk berinvestasi secara syariah juga memiliki potensi yang besar. Nah, di sini pemerintah menyediakan instrumennya tersebut. Jadi, kita juga punya misi yaitu menyediakan alternatif investasi instrumen investasi untuk yang syariah tadi," jelasnya.

Menambahkan hal tersebut, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR, Suminto, mengungkapkan bahwa untuk menjawab tantangan kebutuhan pasar dan dalam rangka diversifikasi instrumen, Kemenkeu melalui DJPPR telah mengembangkan berbagai jenis instrumen Sukuk Negara, baik untuk pasar domestik maupun



Silaturahmi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan perkembangan SBSN di Aula Kantor MUI.

Foto
Wulan Sari

internasional. Diversifikasi tersebut memiliki karakteristik khusus masing-masing untuk mengakomodasi kebutuhan yang ada.

Dari sisi internasional, Kemenkeu telah menerbitkan Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau lebih dikenal dengan sebutan Global Sukuk. Sementara dari sisi domestik sendiri, Kemenkeu menyediakan alternatif jenis Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), *Islamic Fixed Rate (IFR)*, *Project Based Sukuk (PBS)*, Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan SBSN Ritel yang terdiri dari Sukuk Negara Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST).

Instrumen ritel syariah

Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan merupakan instrumen SBSN yang ditujukan untuk menjangkau investor individu atau perorangan warga negara Indonesia. Menurut Suminto, penerbitan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah

untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN dimana masyarakat umum dapat berinvestasi sekaligus berperan serta dalam pembangunan Indonesia. Kehadiran Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dan menambah portofolio investasi bagi investor, terutama investor syariah.

Di samping itu, penerbitan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan Pasar Keuangan Syariah dan mendorong transformasi masyarakat dari *savings-oriented society* menuju *investment-oriented society*. Sukuk Ritel merupakan produk investasi syariah yang menawarkan fitur minimal pembelian Rp5 juta, maksimal Rp5 miliar, jangka waktu (tenor) 3 tahun, dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Sedangkan Sukuk Tabungan merupakan varian baru dari Sukuk Ritel yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2016. Penerbitan Sukuk Tabungan dilakukan sebagai

upaya diversifikasi produk dan untuk memperluas basis investor SBN Ritel terutama yang selama ini belum terjangkau oleh Sukuk Ritel. Sukuk Tabungan menawarkan minimal pembelian yang lebih rendah (Rp2 juta), tenor yang lebih pendek (dua tahun), dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*).

Pembiayaan syariah vs konvensional

Pada prinsipnya, instrumen pembiayaan syariah melalui SBSN (Sukuk Negara) dan instrumen pembiayaan konvensional melalui Surat Utang Negara (SUN) adalah bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan untuk pembiayaan APBN. Namun demikian, kedua instrumen di atas memiliki perbedaan.

Pembiayaan berbasis syariah memiliki karakteristik utama berupa penggunaan akad syariah dan *underlying asset* yang mendasarinya. Setiap instrumen pembiayaan syariah harus menggunakan akad-akad yang

sesuai dengan prinsip syariah, serta harus memiliki aset riil sebagai dasar transaksi. Di samping itu, Sukuk Negara juga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang syariah, seperti maysir (spekulasi), garar (ketidakjelasan), dan riba (bunga).

Menggarisbawahi hal di atas, Suminto menjelaskan bahwa pada konteks tersebut keberadaan *underlying asset* menjadi penting dalam penerbitan SBSN. Misalnya, dengan struktur ijarah atau sewa menyewa akan terjadi transaksi sewa menyewa aset antara penerbit dengan investor, sehingga pembayaran kupon atas SBSN tersebut adalah berupa pembayaran uang sewa atas aset, bukan pembayaran bunga atas pinjaman yang dilakukan penerbit kepada investor.

Fatwa syariah

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan jawaban atas permintaan dari Pemerintah. Sebelum menerbitkan suatu instrumen Sukuk Negara baru, Pemerintah akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DSN-MUI mengenai skema akad syariah yang akan digunakan. Atas skema akad tersebut Pemerintah kemudian mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI sebagai dasar dan pedoman syariah penerbitan serta sebagai acuan dalam menyusun dokumen hukum yang diperlukan. Sejak tahun 2008 sampai dengan kuartal pertama 2018, DSN-MUI telah mengeluarkan enam buah Fatwa yang terkait dengan Sukuk Negara.

Sementara itu, Opini Syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI setelah terlebih dahulu dilakukan review menyeluruh terhadap aspek-aspek penerbitan, antara lain struktur sukuk yang digunakan, akad dan perjanjian yang terdapat dalam penerbitan sukuk, serta dokumen-dokumen lainnya termasuk metode penerbitannya. Jika keseluruhan proses penerbitan sukuk telah sesuai dengan prinsip syariah, maka dapat dikeluarkan opini syariah dimaksud. Sejak tahun 2008 sampai kuartal pertama 2018, DSN-MUI telah mengeluarkan 31 opini syariah yang terkait dengan penerbitan Sukuk Negara.

Mendunia melalui Global Sukuk

Pemerintah mulai menerbitkan Sukuk Negara di pasar global sejak tahun 2009, yaitu melalui seri Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau yang dikenal dengan Global Sukuk, melalui format *stand alone*. Selanjutnya, mulai tahun 2012, Sukuk Negara mulai

diterbitkan dengan format *Islamic Global Medium Term Notes* (Islamic GMTN).

Menanggapi perkembangan tersebut, Executive Vice President BCA Wealth Management, Eva Sumampouw, menyampaikan bahwa penerbitan Global Sukuk tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dari tahun sebelumnya dan menyentuh angka USD97,9 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Maroko, dan Tunisia. Untuk tahun 2018, diperkirakan penerbitan pada Global Sukuk berkisar pada USD80-90 miliar dikarenakan harga minyak yang cenderung lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, Sukuk Indonesia akan menjadi salah satu alternatif yang diperhitungkan di Global Sukuk mengingat *yield* yang ditawarkan cukup menarik.

Sementara itu, pada awal tahun 2018, Indonesia berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan *Sovereign Green Sukuk*. Penerbitan Global Sukuk 2018 oleh DJPPR Kemenkeu tersebut istimewa karena selain sebagai upaya diversifikasi investor, sekaligus juga sebagai manifestasi komitmen Pemerintah pada Paris Declaration.

Tantangan

Dari sisi tantangan yang ada, Direktur Pembiayaan Syariah, Suminto, mengungkapkan tantangan dalam pengembangan Sukuk Ritel sampai saat ini adalah distribusi investor pembeli Sukuk Ritel yang belum merata. Pada penerbitan terakhir Sukuk Ritel seri SR-010 secara nominal, investor terbesar masih berada di wilayah Indonesia Bagian Barat

(selain DKI Jakarta) sebesar 50,58 persen dan DKI Jakarta sebesar 39,36 persen. Sedangkan untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur masih relatif kecil sebesar 10,56 persen dimana 9,48 persen bagian tengah dan 0,58 persen di Bagian Timur.

“Untuk itu, diperlukan berbagai upaya diseminasi kepada masyarakat secara lebih efektif baik melalui media konvensional maupun *online* untuk menarik minat masyarakat terutama di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur,” jelas Suminto.

Mendukung program tersebut, Department Head Retail Deposit Group Bank Syariah Mandiri (BSM), Nurhidayati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan strategi promosi *above the line* dan *below the line*. Untuk strategi *above the line*, BSM melakukan pemasangan iklan di media cetak, media sosial, ataupun media ruang. Sedangkan untuk strategi *below the line*, BSM melakukan sosialisasi kepada investor juga kepada tenaga pemasar. Untuk wilayah Indonesia Timur sendiri, BSM melakukan *investor gathering* untuk meningkatkan tingkat literasi terhadap produk sukuk ritel.

Senada dengan BSM, Eva Sumampouw dari BCA Wealth Management juga melakukan strategi khusus pemasaran untuk masyarakat Indonesia Bagian Timur. “Sosialisasi akan kami lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan *awareness* mengenai investasi yang sesuai dengan prinsip syariah,” jelasnya.

Teks Abdul Aziz



E-SBN MUDAHKAN INVESTASI

Pemerintah sudah melakukan penjualan perdana Surat Berharga Negara (SBN) retail secara daring (*online*) tahun ini. Jenis SBN yang ditawarkan yakni Savings Bond Retail (SBR). SBR seri SBR003 resmi diterbitkan pertengahan Mei lalu. Penerbitan kali ini menjadi istimewa karena proses pembelinya dapat dilakukan secara *online* (e-SBN). Instrumen baru ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dari sekedar senang menabung menjadi sadar berinvestasi.

Mengapa e-SBN

Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara mengatakan, ada beberapa hal yang membuat pemerintah mempertimbangkan e-SBN. Pertama, Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sudah 10 tahun diluncurkan. Hasil evaluasi ORI menunjukkan, sekitar 75 persen investor ritel yang ada saat ini berusia 40 tahun ke atas.

Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) retail secara daring (*online*).

Foto
Anas Nur Huda

"Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar ini, e-SBN bisa menambah investor domestik dalam kepemilikan surat utang Indonesia,"

Hendrikus
Direktur
Pengaturan
Perizinan dan
Pengawasan
Fintech OJK

Menurut Loto, profil ini bisa dimaklumi mengingat umumnya di usia 40 tahun ke atas orang sudah relatif lebih mapan. Kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi sehingga ada dana untuk investasi. Peluncuran e-SBN adalah untuk memperluas basis investor muda yang terbiasa dengan gawai. Apalagi hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mendorong ekonomi inklusif.

Selain itu, sistem penjualan yang selama ini dilakukan secara *offline* menggunakan sistem kuota. Akibatnya ada kecenderungan agen penjual lebih melayani investor-investor besar. "Waktu itu, ada masukan dari investor biasa yang mengatakan dia agak kecewa karena kuotanya kerap habis," kata Loto.

Alasan lainnya, pemasaran ke pelosok Indonesia selama ini masih terbatas, baik dari sisi dana maupun infrastruktur. e-SBN bisa mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Biaya promosi dengan mengunjungi secara langsung bisa ditekan. "Meski tidak ada edukasi tatap muka, tetapi semua daerah dengan akses internet bisa menjangkau informasinya," jelas Loto.

Penyempurnaan Produk

Untuk menarik investor muda, pemerintah juga melakukan penyempurnaan produk. Contoh produk yang sudah ada sebelumnya seperti SBR001 dan SBR002 mensyaratkan pembelian minimal Rp5 juta dengan kelipatan Rp5 juta dan maksimal pembelian Rp5 miliar. "Nah, SBR003 yang ditawarkan di e-SBN sudah bisa dibeli dari Rp1 juta dan kelipatan

Rp1 juta sehingga lebih terjangkau. Maksimal pembeliannya Rp3 miliar. Harapannya, selain bisa menjangkau makin banyak peminat, jatahnya juga terbagi lebih rata," ujar Loto.

Namun, Loto mengingatkan, penjualan SBN *online* yang ditargetkan sebesar Rp30 triliun ini jangan sampai menimbulkan kesan hanya ditargetkan bagi investor milenial. "SBN ritel *online* ini untuk memperluas basis investor, namun terbuka untuk segala usia. Jadi semua kalangan bisa berpartisipasi," katanya.

Persyaratan untuk membeli SBN secara *online* tidak jauh berbeda dengan pembelian secara *offline*. Seperti memiliki KTP, rekening dana, rekening surat berharga, *single investor identification* (SID). "Bedanya, semua persyaratan tersebut diinput pada sistem *online*. Dulu, mitra distribusi kita hanya bank dan perusahaan efek. Nah, sekarang ini dibuka juga untuk perusahaan *fintech*," ujar Loto.

Pengawasan dari OJK

Ditemui di tempat terpisah, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi mengatakan, penyaluran SBN melalui *fintech lending* sudah tepat. Instrumen yang mudah diakses bisa menarik generasi milenial yang tidak suka proses panjang dan sangat bergantung internet.

Hendrikus memaparkan, layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi menyimpan potensi yang sangat besar. Hal ini dapat ditandai dari jumlah

pengguna *mobile internet* aktif di Indonesia yang mencapai 124,8 juta pengguna, sedangkan pengguna internet aktif sebesar 132,7 pengguna menurut data *We are Social* (2018) dalam Global Web Index. "Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar ini, e-SBN bisa menambah investor domestik dalam kepemilikan surat utang Indonesia," kata Hendrikus.

Ditanya mengenai keamanan e-SBN, Hendrikus mengatakan saat ini OJK melakukan pengawasan dengan 2 metode, baik bagi penyelenggara konvensional maupun syariah. Pertama, dengan menganalisis laporan penyelenggara *fintech lending*, baik laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan.

Kedua, pengawasan dilakukan dengan audit tempat kerja penyelenggara, metode tersebut bahkan telah dilakukan ketika mereka berada pada proses pengajuan permohonan pendaftaran. "Perihal produk berbasis syariah, OJK memiliki direktorat khusus yang mengawasi produk yang ditawarkan oleh penyelenggara *fintech* untuk memastikan kesyariahannya," kata Hendrikus.

Hendrikus berharap, peluncuran e-SBN bisa menjadi contoh bagi program pemerintah lainnya. "Penggunaan *fintech* dapat terus berkembang ke *remote area* sehingga seluruh program pemerintah bisa dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, aman, dan nyaman bagi masyarakat," tutup Hendrikus.

Teks Irma Kesuma



Luky Alfirman,
Direktur
Jenderal
Pengelolaan
Pembiayaan
dan Risiko.

Foto
Resha Aditya
Pratama

SBN RITEL: INVESTASI AMAN DENGAN FITUR LUAR BIASA

Investasi tak pernah lepas dari risiko. Beberapa investor memegang prinsip "*high risk high gain*" atau semakin besar risiko suatu instrument investasi maka semakin tinggi keuntungan yang didapat. Di tengah alternatif investasi di Indonesia, pemerintah kini telah menyediakan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang memiliki jaminan keamanan dan berbagai fitur menarik. Simak wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman, mengenai serba-serbi SBN Ritel berikut ini.

Apa pengertian SBN Ritel?

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) yang bersifat konvensional dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBN konvensional terdiri dari ritel (untuk pembeli individu atau perseorangan) dan nonritel. Beberapa instrument SBN Ritel antara lain Obligasi Negara Ritel (ORI), *Savings Bond Ritel* (SBR), Sukuk Ritel, dan Sukuk Negara Tabungan.

Apa latar belakang pemerintah menerbitkan SBN Ritel?

Kita perlu menyadari bahwa *income* kita terbatas, itu yang

dinamakan *budget constraint*. Namun diakui atau tidak, kita ternyata memiliki ketertinggalan yang cukup besar. Pertama, di bidang infrastruktur. *Gap* infrastruktur kita lumayan besar dibanding dengan negara lain. Kedua, di bidang sumber daya manusia (SDM). Dalam survei PISA (*Programme for International Student Assessment*) terhadap siswa-siswi Indonesia, terlihat bahwa skor untuk Indonesia masih rendah. PISA merupakan penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan tiga-tahunan, untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun yang dilakukan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ketiga, di bidang kesehatan, kondisi *stunting* (balita bertubuh pendek) di Indonesia masih terjadi secara luas. Kondisi ini terutama ada di daerah-daerah pelosok Indonesia. Nah, tiga hal utama ini adalah pengeluaran yang tidak bisa ditunda, ini adalah investasi bangsa. Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan kualitas belanja. Pembiayaan pun diperlukan untuk belanja pemerintah yang produktif dan tepat sasaran. Itulah kenapa kita masih punya kebijakan bagi defisit yang artinya berimplikasi pada utang.

Pembiayaan pemerintah berasal dari pinjaman, bilateral maupun multilateral, serta penerbitan SBN. Saat ini komposisinya kurang lebih 81 persen merupakan SBN dalam bentuk obligasi dan 19 persen dalam bentuk pinjaman.

Bagaimana minat masyarakat terhadap SBN yang ditawarkan pemerintah selama ini?

Saat ini pembeli asing menguasai kurang lebih 39-40

persen dari total SBN kita. Artinya apa? Itu menunjukkan adanya *confidence* terhadap Indonesia. SBN itu *underlying*-nya apa sih? Tentunya perekonomian Indonesia. Kalau kondisi perekonomian bagus, pemerintahnya bagus, pasti (SBN) kita akan laku. Kalau fundamental ekonomi kita jelek, orang pasti ragu mau beli.

Pembeli SBN tidak hanya berasal dari asing dan pembeli besar, seperti asuransi, bank, dan *fund manager*. Pemerintah juga ingin menasar individu-individu dengan menerbitkan SBN Ritel. SBN Ritel ini hanya boleh dibeli oleh Warga Negara Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia saat ini masih *saving society*, yaitu masyarakat yang cenderung menabung daripada berinvestasi. Pemerintah juga ingin mendorong masyarakat untuk berinvestasi melalui SBN.

Apa manfaat yang diperoleh masyarakat dari berinvestasi di SBN Ritel?

Pemerintah melalui SBN Ritel ingin mendidik masyarakat mengenai salah satu bentuk instrumen investasi. Instrumen investasi ada beberapa jenis, seperti saham, reksadana, emas, deposito, dan lain-lain. Tapi ada satu keunggulan dari SBN Ritel ini, yaitu masyarakat ikut berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Itu yang juga paling penting. Jadi sekalian bukan hanya sekedar menabung atau berinvestasi saja. Maka pemerintah memiliki *market deepening* atau pendalaman market. Kita ingin punya basis investor yang lebih besar yang lebih banyak, terutama di dalam negeri.

Keunggulan lain dari SBN Ritel dibanding instrumen investasi lain yaitu jaminan pemerintah.

Berinvestasi di SBN Ritel ini aman dibanding saham yang cenderung fluktuatif. Di sisi lain, *return* SBN Ritel ini cukup tinggi yaitu 6,8 persen, bahkan lebih tinggi dibanding tingkat bunga deposito bank BUMN. Terlebih saat ini kita sudah meluncurkan SBR Ritel online atau e-SBN. Masyarakat bisa membeli secara *online* menggunakan internet, tidak perlu repot pergi ke bank.

Apa sebenarnya latar belakang pemerintah menerbitkan SBN secara online?

Pengguna internet di Indonesia selalu meningkat tiap tahunnya, pemerintah ingin mempermudah masyarakat untuk berinvestasi secara *online*. e-SBN ini juga ditujukan untuk generasi milenial yang memiliki interaksi tinggi dengan *gadget* dan internet. Dengan pembelian minimal Rp1.000.000 dan kelipatannya, siapapun bisa berinvestasi di SBN Ritel ini. SBN Ritel ini juga aman dan cocok untuk para investor pemula yang notabene anak muda.

Apakah ke depan semua produk Surat Berharga Negara akan menggunakan sistem online?

Karena e-SBN ini baru perdana diluncurkan, tentunya kami akan evaluasi dulu. Tapi kalau berjalan dengan sukses, kita ingin semua penjualan yang SBN Ritel, baik syariah maupun yang konvensional, bisa diperoleh secara *online*. Kita berharap bisa memudahkan masyarakat berinvestasi. Jadi sebenarnya nama *platform*-nya itu e-SBN, nah sekarang e-SBN ini dipakai untuk penjualan SBR003.

Teks Pradany Hayyu



Istiqlal: Simbol Islam Berkeindonesiaan

Masjid Istiqlal merupakan salah satu simbol negara kebanggaan Indonesia. Bangunan yang berseberangan dengan Gereja Katedral Jakarta ini, menjadi tempat bersatunya umat yang penuh kasih dan saling menghargai. Nasaruddin Umar, selaku imam besar, membagi impiannya kepada Media Keuangan akan peran Istiqlal dalam membangun peradaban Islam. Berikut petikannya.

Masjid Istiqlal Jakarta

Foto Tino Adi Prabowo

Seperi apa corak keislaman di Indonesia yang membedakan dengan negara lain?

Kita ini *kan* negara maritim dan kepulauan. Pada dasarnya, dalam falsafah bangsa Indonesia, di manapun ada pantai, kapal dari manapun boleh berlabuh. Tidak ada bangsa manapun yang dilarang untuk mampir dan mengambil air tawar. Sebab, budaya maritim lebih egaliter, tidak ada stratifikasi sosial.

Sementara, strata sosial di negara daratan atau kontinental seperti tempat nabi lahir, saat itu ada 12 tingkat. Tingkat yang paling tinggi adalah suku Quraish dan Bani Hasyim, khususnya laki-laki. Sementara yang paling rendah adalah budak perempuan asing. Bahkan, meski mereka ditawarkan di pasar, *enggak* ada yang mau *ngambil*. Begitu rendahnya kedudukan perempuan asing non Arab.

Sebetulnya kenapa tidak ada nabi di Indonesia? Karena masyarakatnya maritim dan egaliter. Dengan *ustadz* saja sudah cukup, *kok*. Tapi kalau di sana, meski ada banyak nabi, tapi masih 'keras' *tuh*, karena masyarakatnya kontinental.

Jadi bersyukur kita sudah terbiasa dengan perbedaan. (Kita) dari sisi geografis, bahasa, etnik, budaya, dan agama sangat berbeda satu sama lain, tapi *kok* bisa kompak? Ini adalah rahmat. Coba lihat Afganistan, dari ujung ke ujung hanya ada 7 etnik, tapi perang saudara terjadi siang malam.

Justru tugas nabi adalah membawa Islam untuk menciptakan masyarakat yang egaliter. Makanya, umumnya bunyi ayat-ayat suci adalah menstarakan. Yang paling mulia di sisi Allah (adalah) yang paling bertakwa.

Selain untuk beribadah, apa saja peran masjid?

Fungsi masjid bukan hanya tempat untuk sujud. Dulu, masjidnya Nabi SAW berfungsi sebagai Baitul Mal atau jawatan perbendaharaan negara. Jadi, semua kumpulan harta rampasan perang, zakat,

sedekah, infaq, dan jariah dipusatkan di masjid. Harta tersebut kemudian didistribusikan bagi siapa saja yang membutuhkan, sekalipun beragama lain.

Kedua, masjid berfungsi sebagai balai pertemuan. Acara apapun bisa diselenggarakan di masjid, termasuk untuk menerima tamu dari luar kota. Kalau mau menginap ada komplek yang bernama *Ashabush-Suffah* karena tidak ada hotel. Selanjutnya, masjid nabi berfungsi sebagai rumah sakit. Kalau ada yang terluka saat perang, akan dirawat di masjid oleh tabib. Masjid nabi juga berfungsi sebagai penjara. Tawanan perang itu tidak boleh dijemu, apalagi cuaca di sana sangat panas. Sekalipun dia tawanan perang, manusia tetap harus dihormati.

Masjid nabi itu juga berfungsi sebagai madrasah, perguruan tinggi, dan rumah keterampilan. Misalnya keterampilan menyamak kulit, rias pengantin, dan pertukangan seperti kayu, besi, dan senjata. Latihan bela diri juga diselenggarakan di masjid. Jadi, sebelum nabi perang, latihan perang-perangan itu dilakukan di masjid.

Ruangan masjid juga bisa dipakai sebagai tempat pertunjukan seni. Aisyah, istri nabi itu suka seni. Dia pernah mengundang seniman Habasyah untuk melakukan pertunjukan di masjid lengkap dengan alat-alatnya.

Selain itu, masjid nabi juga berfungsi sebagai pengadilan. Semua persoalan pidana dan perdata diputuskan di masjid. Musyawarah masal juga dilakukan di masjid. Nabi pernah menjamu 60 orang tokoh lintas agama di masjid dengan makanan dan minuman. Mereka dipimpin oleh Abdul Masih yang beragama Kristen.

Hal yang paling penting, menara masjid nabi bukan hanya digunakan untuk adzan. Namun, dari ketinggian menara tersebut dimaksudkan untuk melihat rumah-rumah mana saja yang dapurnya tidak berasap. Sahabat nabi

akan mengunjungi rumah tersebut untuk melihat apakah ada saudara kita yang tidak punya makanan. Jadi, menara masjid itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk kontrol sosial.

Sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara apa saja potensi masjid Istiqlal?

Ide masjid nabi ingin saya terapkan di masjid Istiqlal. Saya ingin Istiqlal menjadi bagian untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Maka itu, dulu kami pernah mengadakan Festival for Mystical Music yang mempertemukan banyak pihak. Di antaranya seni-seni lokal, seni-seni internasional, dan pameran-pameran spiritual. Jadi, semua seni relijius lain bisa tampil di masjid.

Nah, saya pikir Istiqlal harus menjadi contoh. Saya sudah bicara dengan Telkom dan pak Ilham Habibie untuk membantu Istiqlal menjadi *e-mosque* dengan sistem informasi yang canggih. Dengan begitu, semua khotbah yang kita sampaikan di sini juga bisa ditayangkan dan dinikmati di seluruh masjid di Indonesia.

Saya juga ingin Istiqlal menjadi kiblat peradaban dunia Islam modern. Kiblat ibadah memang ada di Masjidil Haram, tapi kini kiblat peradabannya ada di Indonesia. *Why not?* Kami berkeyakinan bahwa tugas Timur Tengah untuk melahirkan Islam sudah selesai.

Pada akhir kepemimpinan Kekhalifahan Utsmani, pusat peradaban Islam dipindahkan dari Madinah ke Suriah oleh Muawiyah. Setelah Muawwiyah kalah oleh Abbasiyah, pusat tersebut dipindah ke Baghdad oleh Bani Abbasiyah. Lama-kelamaan setelah Abbasiyah kalah, diboyonglah pusat Islam ke Turki Utsmani.

Nah, Turki Utsmani sekarang ini *kan* sudah selesai. Sekarang giliran Indonesia untuk membangun peradaban Islam. Negara dengan populasi muslim terbesar dan paling aman saat ini *kan* Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu luar



Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal

Foto Anas Nur Huda

biasa, dengan segala kekurangannya. Sementara negara Islam lain masih sibuk perang, ya *kan*?

Makanya di sini selalu ramai dengan turis Ramadan. Kalau ingin merasakan nikmatnya berpuasa Ramadan, datanglah ke Indonesia. Anda bisa pilih masjid mana saja dari dari ujung ke ujung tanpa takut pulang jadi mayat seperti di Afganistan.

Bagaimana Indonesia menampilkan Islam yang maju, modern, dan terbuka?

Nah, kita lihat Islam di Indonesia bisa *kok* tampil paralel dengan demokrasi. Islam di Indonesia juga berjalan paralel dengan hak asasi manusia, sains dan teknologi, kesetaraan gender, dan ekonomi modern. Kita sudah selesai dengan semua itu, tidak ada masalah. Mau ekonomi pasar bebas, Indonesia tetap eksis, *kan*. Hanya ada 3 negara dengan penduduk mayoritas muslim yang menjadi anggota G-20, yaitu Indonesia, Saudi Arabia, dan Turki.

Indonesia sebagai representasi muslim terbesar di dunia bisa melakukan pemilihan umum langsung. *One man one vote*. Kita lebih demokratis dari Amerika, sementara negara-negara Islam lain masih setengah hati bicara demokrasi, *kan*?

Seperlima muslim dunia itu ada di Indonesia. Sebab itu, peran Indonesia untuk menampilkan citra Islam yang positif itu sangat besar. Coba kalau tidak ada Indonesia, mungkin kesimpulan orang Islam itu agama teroris.

Istiqlal berarti merdeka. Dalam konteks saat ini, apa makna kemerdekaan tersebut?

Merdeka itu tidak akan pernah hilang karena hak asasi manusia yang paling mendasar adalah kemerdekaan atau Al-Hurriyah dan Al-Istiqlal. Kita di sini merdeka untuk berpendapat, merdeka untuk mencari nafkah secara halal, merdeka untuk

menganut keyakinannya masing-masing, merdeka untuk memilih pemimpin yang dikehendaki, merdeka untuk menulis apapun, merdeka untuk memilih makanan apapun. Jadi, kemerdekaan itu *on going process* yang berlapis-lapis.

Apa pesan dari Istiqlal untuk Ramadan tahun ini?

Saya minta semuanya menghormati bulan Ramadan apapun agamanya. Bagi yang tidak berpuasa, hargailah orang yang berpuasa. Sementara, yang berpuasa juga jangan egois. Mentang-mentang ada orang yang *enggak* berpuasa lantas mau menghakimi mereka. Salah juga itu.

Kedua, mari kita produktif dalam bulan suci Ramadan karena hampir semua peristiwa monumental dalam dunia Islam terjadi dalam bulan suci Ramadan. Misalnya perang badar, penaklukan kota Mekkah, pembangunan Universitas Al-Azhar, dan lain sebagainya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga jatuh pada bulan Ramadan. Maka, puasa jangan *loyo ya*, harus produktif.

Teks Irma Kesuma

Direktorat Pengelola Risiko Keuangan Negara

Kelola Risiko Keuangan Makro

Mengelola keuangan negara bukanlah perkara mudah. Banyak komponen yang harus diperhatikan untuk mengantar sebuah bangsa menjadi digdaya. Direktorat PRKN hadir untuk memetakan dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam mengelola uang kita.



Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan risiko rencana cepat pembangunan infrastruktur.

Seiring dengan pengimplementasian transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, dibentuklah Direktorat PRKN. Langkah tersebut diikuti dengan pemindahan unit Eselon II ini dari BKF ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Dengan masuknya unit pengelola risiko di dalam struktur organisasinya, DJPU pun bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Direktorat PRKN hadir sebagai jawaban atas tantangan pengelolaan keuangan negara yang makin dinamis.

Esensi tata kelola keuangan negara

Memang berat tanggung jawab yang harus diemban oleh para staf di Direktorat PRKN. Tak hanya berat dikerjakan namun juga susah untuk dijabarkan secara gamblang. Fokus pengawasannya bukan hanya risiko pada APBN, namun mencakup keseluruhan neraca negara.

"Jadi esensinya yang pertama itu adalah memastikan bahwa keuangan negara itu sanggup memenuhi kewajiban kepada pihak luar, baik jangka pendek, menengah dan panjang!" tegas pria yang biasa dipanggil Bram ini. Perubahan struktur APBN yang menjadi *i-account* serta model pinjaman dari G2G (*government to government*) menjadi *market oriented* termasuk juga jadi faktor penentu. Agar pasar tetap percaya, perlu adanya pihak yang mampu menjamin kesehatan dan kemampuan APBN kita.

Di sinilah peran Direktorat PRKN sangat dibutuhkan. Bram dan tim dituntut mampu menelaah seluruh komponen dan membaca fenomena ekonomi. Sehingga, risiko-risikonya dapat teridentifikasi dan bisa dimitigasi lebih dulu, lalu dipilihkan

Berbagai kegiatan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara seperti Study Visit Korea, Sosialisasi Pinjaman Daerah, dan Sosialisasi Ekspor.

Foto
Dok. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara



solusi terbaik mengatasinya. "Harus mampu menyusun neraca untuk tahu kekuatan *balance sheet* kita sehingga bisa diputuskan pilihan yang tepat, apakah mau pinjam, utang, atau mau pajaknya diperbesar?" lanjutnya.

Rumuskan kebijakan keuangan

Dalam mengelola risiko keuangan, Direktorat PRKN mengacu pada *best practice* manajemen risiko. Pelaksanaannya meliputi penetapan konteks, pengidentifikasian, dan melakukan analisis. Langkah tersebut dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi mitigasi berbagai obyek risiko keuangan negara. Tak sampai di situ saja, tim ini juga melakukan *monitoring* serta evaluasi.

Pengelolaan risiko harus dimulai sejak awal pelaksanaan keuangan negara. Dari proses perencanaan, pemisahan fungsinya, perbendaharaan dalam pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Proses panjang tersebut dilakukan secara terus menerus maupun sebagai

bentuk respons perubahan kebijakan dan kondisi perekonomian. Dalam menjalankan fungsinya, Direktorat PRKN juga melibatkan beragam *stakeholders*, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.

Keterbukaan hadapi perubahan

Dalam pekerjaannya, Bram tak hanya harus cakap menghadapi krisis keuangan negara. Ia juga harus piawai dalam menghadapi masalah internal organisasinya. Tim yang ia pimpin memang tak terlalu besar. Jumlah sumber daya manusianya hanya sekitar 60 orang, 20 diantaranya merupakan *fresh graduate*.

"Kalau saya meyakini teman-teman ini potensinya bagus, tinggal bagaimana memberikan kesempatan dan kontribusi dalam pekerjaannya." ujarnya mantap. Sebagai pimpinan, Bram mendorong para stafnya untuk berani mengambil keputusan. Dirinya juga menjamin bahwa keputusan tersebut akan menjadi tanggung jawabnya. Langkah ini dipercaya dapat menumbuhkan tingkat percaya diri di kalangan stafnya, terutama yang masih muda.

Dengan kepercayaan diri ditambah keinginan untuk berkontribusi, tinggal menunggu inisiatif masing-masing individu dalam cara penyampaian. Bram pun membebaskan para stafnya ingin secepat apa pesan tersebut tersampaikan. "Mau lewat nota, berbincang langsung, atau berkiriman pesan di *Whatsapp*, saya *open* saja!" ungkapnya.

Lebih kritis sebelum krisis

Risiko yang mengancam keuangan negara akan selalu ada dan akan makin sering muncul. Penyebabnya bisa dari eksternal, internal, maupun yang datang dari *risk manager*-nya sendiri. Sebagai pimpinan ia wajib mendorong jajarannya untuk terus belajar dan selalu terbuka dalam diskusi. "Kita tidak boleh terlalu percaya diri, harus buka kebiasaan untuk tidak membatasi pandangan kita. Sehingga bisa meng-*calculate* risiko dengan lebih baik," pesan Bram.

Pihaknya pun mewajibkan seluruh pegawai di Direktorat PRKN untuk mengambil sertifikasi manajemen risiko. Setidaknya separuh dari jumlah keseluruhan staf telah mengantongi sertifikat tersebut. Belajar mengenai *risk management*, mau tidak mau juga harus memiliki pemahaman tentang *finance* dan hukum. "At the end, semuanya kan harus dituangkan dalam peraturan atau regulasi, jadi harus paham itu semua." tutupnya.

Teks Dimach O.K Putra

SEMANGAT BERBAKTI UNTUK IBU PERTIWI

Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multilateral

Malam semakin larut. Suasana hening pedesaan menjaga kekhusukan malam. Sesosok anak kecil digendong di pangkuan sang ibu. Jernih suara sang ibu selalu mendoakan agar sang anak bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Doa itu lah yang masih terkenang dalam benak sosok pemuda jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Di cerita kehidupan yang lain, sebuah kelaziman pada akhir abad keduapuluhannya bahwa pekerjaan pegawai negeri bukan menjadi suatu cita-cita kebanyakan angkatan muda. Selain karena faktor penghasilan yang masih di bawah rata-rata sektor swasta, proses birokrasi seleksi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) juga dinilai cukup panjang. Namun, pandangan tersebut berbeda bagi sesosok pemuda itu. Baginya, menjadi pegawai negeri merupakan cita-cita mulia yang harus diperjuangkan.



Foto:
Dok. DUPO

"Negara ini punya potensi besar dan bisa menjadi negara yang besar kalau hal-hal semacam itu bisa kita jalani."

Parjiono
Kepala Pusat
Kebijakan
Pembiayaan
Perubahan Iklim
dan Multilateral
(PKPPIM) Badan
Kebijakan Fiskal
Kemenkeu.

Menurutnya, dengan menjadi PNS, ia mampu berkontribusi secara langsung kepada masyarakat karena kebijakan yang dihasilkan lebih berdampak luas dan langsung dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 1996, ia bahkan rela melepas pekerjaannya di sektor perbankan untuk mengabdikan kepada negara melalui Departemen Keuangan. Ialah Parjiono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Investasi melalui pendidikan

Selain ingin berkontribusi lebih banyak melalui sektor pemerintahan, Parjiono juga memiliki cita-cita tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ia terinspirasi oleh orang tuanya untuk mengutamakan pendidikan daripada investasi manapun. "Saya harus bisa melanjutkan sekolah karena orang tua juga bilang kalau investasi yang paling besar, dan yang paling akan kelihatan jangka panjang adalah pendidikan," ungkapnya.

Hal itu pun ia buktikan dengan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi teknis pekerjaan, namun juga dari sisi akademis. Ia berhasil menyelesaikan gelar masternya di Korea Development Institute pada tahun 2000. Tak lama berselang, pada 2010 ia menyempurnakan gelar doktoralnya di James Cook University Australia. Berkat keberhasilannya, ia pun pernah ditugaskan di beberapa bidang kerja sama bilateral dan multilateral, seperti kerja sama ASEAN dan Bank Dunia. Baginya, karier bukanlah hal yang perlu dikejar. Namun dengan memberikan hasil kerja yang terbaik, maka karier akan mengikuti dengan sendirinya.

Kerja sama internasional

Pengalaman di bidang kerja sama antarnegara menjadi modal bagi Parjiono untuk lebih meningkatkan kinerja institusinya. Sebagai Kepala PKPPIM, ia merasa perlu memformulasikan peran strategis Indonesia di kancah dunia. Ia mengungkapkan bahwa setidaknya ada dua aspek yang perlu dioptimalkan. Yang pertama adalah aliran keluar, yakni bagaimana pemerintah menunjukkan pengalamannya dalam merencanakan dan mengelola berbagai macam aspek pembangunan pada dunia internasional.

"Yang kedua, pengalaman internasional atau dari luar yang bermanfaat dan bisa dipakai perlu diambil dan diterapkan di dalam negeri. Contohnya yang dari luar, seperti saat ini

kita menerapkan *automatic exchange of information*, kemudian kita juga berkoordinasi dengan dunia internasional tentang bagaimana menghadapi kondisi global saat ini yang tidak menentu. Ini kan kita harus komunikasi dengan internasional, *sharing expertise*," jelasnya.

Adaptif

Dalam memimpin organisasi pun, Parjiono selalu menekankan agar institusinya mampu menjadi institusi yang *adaptive to change*. Hal tersebut menjadi penting mengingat akan semakin banyaknya tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara ke depannya, terutama dari sisi daya saing dunia.

"Apalagi kita di forum internasional, levelnya juga harus internasional. Standar kita juga perlu level internasional. Jadi bagaimana bisa kita menggali potensi yang ada di sumber daya manusianya dengan *knowledge* yang berkembang begitu pesat," ungkapnya.

Bersahaja

Parjiono memiliki prinsip untuk hidup bersahaja dari kedua orang tuanya. Menurut orang tuanya, Bapak Ibu Cipto Widarto, uang yang banyak akan selalu habis, namun uang sedikit pun sebenarnya sudah cukup untuk hidup. Semua tergantung dari bagaimana orang menggunakan hartanya. Selain itu, orang tuanya juga mengajarkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab melalui pemberian tugas rumah kepada masing-masing anak-anaknya.

Di sisi lain, sebagai anak sulung, ia juga memiliki tanggung jawab untuk membantu kedua orang tuanya. Dengan begitu, ia juga belajar untuk selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan



Bersama
Nasaruddin
Umar, Imam
Besar Masjid
Istiqlal.

Bersama
Keluarga

Bersama
Pejabat
Kementerian
Keuangan.

Foto
Dok.Pribadi

yang diharapkan. "Jadi dari kecil kita sudah diajarkan mandiri semua. SD itu sudah bantu orang tua nyari nafkah, tanpa melupakan bahwa saya harus tetap bersekolah. Jadi, latihan mandiri itu dalam kehidupan dari kecil. Saya dan adik-adik saya diajarkan semua kerja keras dan mandiri. Kerja kerasnya dari bantu orang tua. Bangun dari pagi. Jadi *enggak* boleh bangun siang juga. Kalau bangun siang udah *enggak* kebagian rezeki, rezekinya udah dipatok ayam," ceritanya kepada Media Keuangan.

Karena sering membantu orang tuanya, ia jadi mahir memasak. Bahkan, memasak menjadi salah satu hobinya. Berbagai macam bumbu masakan Jawa pun ia kenal. Ia juga mempelajari beberapa masakan negara lain ketika ia bersekolah di Korea dan Australia.

Dukungan keluarga

Dalam meniti kariernya, Parjiono banyak menghadapi berbagai tantangan yang semakin besar ke depannya. Namun demikian, istrinya, Emi Rosyadah, dan keempat anaknya, Aulia Parsya Karani Parjiono, Prigelle Mrantashi Parjiono, Pandhego Reagan Parjiono, dan Wasesha Higo Parjiono, selalu memberikan dukungan kepada dirinya. Bahkan, istrinya sempat mengajukan pensiun dini agar bisa lebih fokus kepada keluarga. Hal tersebut turut mendukung dirinya agar lebih semangat dan fokus dalam bekerja.

Lebih jauh, ia ingin mengajarkan kepada anak-anaknya agar dalam bekerja harus memberikan fokus penuh pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Tak jarang Parjiono harus pulang larut malam dan tetap bekerja Sabtu-Minggu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di sisi lain, ia juga tetap memprioritaskan

kebutuhan keluarga sebagai yang utama. Meski memiliki jadwal yang padat terutama dalam menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan kebijakan multilateral, ia selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan keempat anaknya saat malam hari atau melalui saluran komunikasi *online*.

Harapan

Parjiono memiliki harapan besar kepada institusi dan negaranya. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang besar. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat diperoleh secara otomatis. Untuk mencapai bangsa yang besar diperlukan kerja keras tanpa kenal lelah dan menyerah oleh semua kalangan.

"Ke depan itu akan banyak tantangan. Semua orang, semua negara menghadapi itu, semua orang juga menghadapi tantangan dan semua orang harus menyelesaikan itu. Nah di situ kita diuji, bisa atau tidak menghadapi tantangan itu. Negara ini punya potensi besar dan bisa menjadi negara yang besar kalau hal-hal semacam itu bisa kita jalani," harapnya.

Dari sisi diri pribadi, ia sudah merasa bersyukur sudah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang doctoral dan memiliki jenjang karier hingga saat ini. Baginya, semua itu merupakan keberhasilan dari kedua orang tuanya. "Saya sampai S3 sekolah kemudian sampai bekerja di level ini, bukan keberhasilan saya. Ini keberhasilan orang tua dalam mendidik saya. Sementara itu, hasil keberhasilan saya terlihat nanti di anak-anak saya. Bisa jadi saya tidak lebih baik dari orang tua saya dalam mendidik anak," ungkapnya.

Teks Abdul Aziz

Kelola Sistem Keuangan Hadapi Turbulensi

Korporasi perlu terus didorong untuk melakukan *hedging* guna memitigasi risiko nilai tukar, sehingga penguatan Dolar Amerika Serikat (AS) diharapkan tidak mengganggu aktivitas ekonomi domestik



Transaksi di pasar.

Foto Resha Aditya Pratama

Menuju akhir semester pertama 2018, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan positif, meski tidak sebesar ekspektasi sebagian besar pihak. Pertumbuhan ekonomi terdongkrak sedikit dari kuartal sebelumnya dengan motor berupa konsumsi dan investasi.

Di tengah perkembangan positif ini, terdapat risiko dari sektor keuangan global yang mempengaruhi, khususnya nilai tukar Rupiah. Ke depan, penguatan fundamental dan pengelolaan stabilitas sistem keuangan yang tepat, dipercaya mampu menjaga stabilitas makro ekonomi Indonesia.

Perekonomian global konsisten baik

Pada Mei 2018, perkembangan positif perekonomian global terlihat masih konsisten. Sektor perdagangan internasional terus menunjukkan perkembangan yang baik. Meski dengan kecepatan yang berbeda-beda.

Di tengah kekhawatiran dampak proteksionisme, neraca perdagangan Tiongkok justru meningkat pesat, setelah bulan sebelumnya bernilai negatif. Nilainya bahkan melebihi ekspektasi. Sementara indikator lain, seperti komoditas, juga menunjukkan pergerakan yang stabil. Komoditas minyak mentah, misalnya, cenderung meningkat secara moderat.

Meski membaik, tekanan tetap terjadi pada sektor keuangan global. Seiring perbaikan berbagai indikator perekonomian, seperti inflasi dan penciptaan lapangan kerja di AS, terdapat kekhawatiran perlu dipercepatnya kenaikan suku bunga the Fed (*Fed Fund Rate/FFR*).

Hal ini tercermin pada pertemuan *Federal Open Market Committee* (FOMC) awal Mei 2018 lalu. Meski hasil pertemuan memutuskan untuk menahan FFR, diindikasikan adanya kekhawatiran bahwa kenaikan inflasi yang cepat ke depan akan memicu kenaikan FFR yang lebih cepat pula. Hal ini berdampak bukan hanya pada AS, melainkan juga negara *emerging market* (EM).

Selama kuartal I 2018, indeks saham global (*MSCI Index*) masih mencatatkan penguatan, didorong kenaikan yang besar selama Januari. MSCI negara berkembang pada 2018 tumbuh 3,4 persen. Sementara MSCI negara maju tumbuh 1,9 persen.

Faktanya, kenaikan FFR sejak akhir 2015 tidak diikuti dengan penguatan Dolar AS signifikan yang terjadi pada 2014. Hal ini mengindikasikan pasar sudah melakukan *priced-in*. Bahkan, pada 2017 aliran modal masuk ke EM juga tercatat tinggi, meskipun FFR dinaikkan sebanyak 3 kali.

Namun demikian, keberlanjutan normalisasi tetap perlu diwaspadai. Terutama apabila terjadi kenaikan yang

cepat, khususnya bagi Indonesia sebagai *capital importing country*. Apresiasi pada dolar AS ini, akan membebani pembayaran impor dan hutang luar negeri Indonesia.

Ekonomi domestik masih perlu ditingkatkan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian global yang positif, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) di kuartal pertama 2018 tumbuh sebesar 5,06 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, yaitu 5,01 persen (yoy). Namun, tingkat pertumbuhan ini sedikit melenceng dari tren positif yang secara berkesinambungan terjadi sejak kuartal keempat 2016.

Tingkat pertumbuhan terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang bertumbuh sebesar 4,95 persen (yoy). Jumlah ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan pada beberapa tahun terakhir sebesar 5 persen. Pertumbuhan konsumsi juga diharapkan bisa lebih tinggi lagi, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor pendorong konsumsi adalah inflasi yang dijaga rendah.

Memasuki masa-masa kampanye pemilihan kepala daerah pada 2018, konsumsi partai atau Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) turut mendorong

konsumsi secara umum. Pertumbuhannya sebesar 8,09 persen (yoy). Sementara untuk belanja pemerintah, tumbuh sebesar 2,73 persen (yoy).

Selanjutnya, sejalan dengan terus diupayakannya perbaikan iklim investasi, pada kuartal lalu, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 7,95 persen (yoy). Jumlah ini tertinggi dalam empat tahun terakhir. Upaya pemerintah dan swasta, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur, serta bentuk investasi lainnya turut menopang pertumbuhan investasi ini. Pertumbuhan investasi langsung yang lebih tinggi juga turut mendukung kinerja PMTB secara keseluruhan.

Selain itu, defisit neraca perdagangan perlu ditingkatkan kontribusinya bagi perekonomian. Pada kuartal I 2018, ekspor dan impor dalam PDB masing-masing tumbuh sebesar 6,17 dan 12,75 persen (yoy).

Pada 15 Mei 2018, rilis BPS juga mengonfirmasi kenaikan impor pada barang konsumsi maupun bahan baku di bulan April 2018. Total impor Januari hingga April 2018 sebesar USD60,05 miliar atau meningkat 23,85 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara total ekspor meningkat hanya 8,77 persen menuju USD58,74. Hal ini mendorong neraca perdagangan mengalami defisit sebesar USD1,63 miliar. Selanjutnya secara sektoral, pertumbuhan positif relatif merata pada sektor utama,

termasuk manufaktur dan jasa.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, inflasi yang rendah turut menjaga konsumsi masyarakat. Pada April 2018 lalu, inflasi tercatat sebesar 0,1 persen (*mtm*) atau 3,41 persen (yoy). Dari tiga komponen inflasi yaitu inflasi inti, harga bahan pangan yang bergejolak, serta harga yang diatur pemerintah, seluruhnya stabil dan cenderung memberikan andil kepada inflasi, kecuali untuk harga yang diatur pemerintah.

Seiring tidak adanya kebijakan harga energi, komponen *administered price* mengalami tren menurun sejak Juli 2017. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi bersifat *artificially low* dengan tingkat harga global yang secara umum sudah meningkat.

Antisipasi kenaikan bunga, dolar AS menguat

Hingga Mei 2018, keseimbangan eksternal perlu menjadi perhatian. Akibat defisit neraca perdagangan, keseimbangan eksternal yang tercermin dari kondisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) menjadi lebih rentan.

Pada data terakhir, neraca modal dan finansial masih menjadi penopang surplus NPI. Namun saat ini, kinerja neraca modal berisiko terus turun akibat gejolak dari sektor keuangan global yang menyebabkan harga Dolar AS meningkat. Untuk itu, kinerja neraca transaksi berjalan perlu ditingkatkan.

Pelemahan Rupiah yang sempat mencapai Rp14.000 per dolar AS pada 7 Mei 2018 lalu memantik kekhawatiran akan terulangnya efek penghentian program pembelian aset keuangan (Fed tapering) 2014. Pada 21 Mei 2018, Rupiah ditutup pada Rp14.176 per dolar AS atau terdepresiasi 4,64 persen dari akhir 2017.

Indikator lainnya juga terimbas akibat dari apresiasi dolar AS terhadap seluruh mata uang. Sementara itu, IHSG melemah 6,43 persen (ytd), sedangkan tingkat imbal hasil SUN 10 tahun meningkat 75,9 basis poin menuju 7,08 persen.

Pelemahan pasar keuangan domestik sejalan dengan keluarnya dana asing sebesar Rp50,74 T dari SUN (outflow Rp8,94 T per 18 Mei) dan saham (outflow Rp41,8 T per 21 Mei). Dari sisi domestik, terjadi sedikit penyesuaian strategi investor yang terlihat dari turunnya permintaan atas aset keuangan selama beberapa bulan terakhir. Kenaikan BI 7-Day Repo Rate sebesar 25 bps menuju 4,5 persen pada 17 Mei 2018 diharapkan dapat menahan outflow ke depan.

Perlu Perkuat Fundamental

Meski banyak pihak mulai khawatir atas pergerakan Rupiah, perlu digarisbawahi bahwa saat ini Indonesia jauh lebih kuat secara fundamental. Hal ini dapat dilihat dari inflasi, defisit APBN, dan defisit neraca transaksi berjalan yang rendah. Berbeda dengan 2014, saat Indonesia bersama Brazil, Turki, India, dan Afrika Selatan sempat dimasukkan kategori *Fragile Five*.

Saat itu, kesemuanya memiliki inflasi di atas 5,8 persen, defisit APBN di atas 1,8 persen dari PDB, dan defisit transaksi berjalan di atas 3 persen terhadap PDB. Meski menguat secara fundamental kini, neraca perdagangan Indonesia yang



Josua Pardede
Ekonom PT. Bank Permata, Tbk.

mengalami defisit di kuartal I 2018, serta problema struktural NPI terkait neraca pendapatan dan jasa, tetap perlu diwaspadai.

Selanjutnya, perbaikan pada defisit neraca pendapatan primer dan neraca jasa perlu terus didorong dengan beberapa kebijakan yang telah dimulai pada 2017. Beberapa diantaranya dengan memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor dan impor, meningkatkan usaha galangan kapal atau pemeliharaan kapal di luar negeri, memberi kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional, serta melakukan penguatan kelembagaan dan kewenangan *Indonesia National Single Window* (INSW).

Selain sisi fundamental, kebijakan mendorong korporasi dan bank diharapkan menambah kemampuan kita menghadapi turbulensi. Kebijakan tersebut antara lain untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) melalui Peraturan Menteri BUMN 09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN dan Peraturan BI 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Termasuk, penguatan kerangka pengelolaan stabilitas sistem keuangan melalui UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan.

Tren pelemahan Rupiah terhadap dollar AS yang berlangsung sejak Februari 2018 dan sudah menembus level psikologis Rp14.000 per dollar AS pada awal Mei 2018 didorong oleh peningkatan permintaan Dolar AS di pasar global. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Rupiah bukan satu-satunya mata uang yang melemah terhadap Dolar AS. Peso Argentina, Lira Turki, Real Brazil, Rupee India dan Peso Filipina, merupakan mata uang negara berkembang yang juga melemah terhadap Dolar AS. Bahkan, pelemahannya lebih besar dibandingkan Rupiah secara *year to date*.

Penguatan Dolar AS terhadap mata uang dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berlangsung dalam periode waktu yang berdekatan, sehingga menahan penguatan Rupiah dalam jangka pendek.

Pertama, tren perbaikan ekonomi AS telah mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral AS yang lebih agresif. Kedua, isu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Ketiga, meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan Iran yang juga telah memicu kenaikan harga minyak dunia.

Sementara dilihat dari sisi ekonomi domestik, beberapa indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, neraca transaksi berjalan, cadangan devisa dan kinerja fiskal secara umum menunjukkan tren yang membaik. Hal ini selanjutnya mengonfirmasi bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

Dampak dari peningkatan volatilitas Rupiah belakangan ini diperkirakan turut

mempengaruhi dunia usaha, mengingat beberapa sektor ekonomi domestik masih mengandalkan bahan baku impor. Jika tren harga bahan baku yang diikuti dengan pelemahan Rupiah terus berlanjut, maka akan mempengaruhi juga kegiatan produksi perekonomian.

Demikian pula biaya impor yang di-*pass through* ke konsumen akan mendorong inflasi domestik. Oleh sebab itu, korporasi perlu terus didorong untuk melakukan *hedging* dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar, sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi domestik.

Oleh sebab itu, pemerintah dan otoritas moneter perlu mendorong stabilitas nilai tukar sedemikian sehingga tetap mendukung momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam rangka meredam volatilitas Rupiah serta fluktuasi di pasar SUN, BI telah melakukan langkah-langkah stabilisasi baik di pasar valas dan pasar SUN. BI juga berkomitmen untuk memperkuat *first* dan *second line of defense* dalam mencegah berlanjutnya *capital flight* dari pasar keuangan domestik.

Pemerintah perlu menyiapkan serta memastikan mekanisme *Crisis Management Protocol* (CMP) sehingga otoritas fiskal, moneter, dan industri jasa keuangan dapat bertindak cepat dan tegas dalam mencegah krisis. Kepercayaan pelaku pasar serta ekspektasi masyarakat umum juga perlu dikelola agar meredam spekulasi pembelian dollar AS yang dapat mendorong pelemahan Rupiah lebih lanjut.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Teks Adelia Pratiwi
Staf Khusus Kepala Badan Kebijakan Fiskal

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AKPD)

"JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AKPD) ADALAH JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM LINGKUNGAN INSTANSI PUSAT DAN DAERAH."

Uji Kompetensi Gelombang II dilaksanakan tanggal 26 Juli 2018.

Pengajuan usulan peserta Uji Kompetensi Gelombang II sampai dengan minggu ke-3 bulan Juni 2018.

BAGAIMANA MENJADI SEORANG AKPD?

Syarat menjadi pejabat fungsional AKPD melalui mekanisme *inpassing* adalah:

- berijazah paling rendah S-1 atau D-4,
- memiliki golongan paling rendah III/a, memiliki pengalaman kumulatif 2 tahun di bidang analisis keuangan pusat dan daerah
- mengikuti dan lulus uji kompetensi,
- memiliki nilai kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir,
- memiliki usia paling tinggi 55 tahun untuk pertama dan muda, 57 tahun untuk madya dan utama,
- tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tugas belajar, dan cuti diluar tanggungan negara.

Usulan ASN yang akan mengikuti uji kompetensi pejabat fungsional AKPD, disampaikan kepada:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Gedung Radius Prawiro
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710

MEMBANGUN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN YG LEBIH BAIK

DJPK MEMANGGIL!

Informasi lebih lanjut hubungi 021 - 3867924
e-mail: jafungakpd@gmail.com

Zakat Bisa Jadi Solusi

Masyitha Mutiara Ramadhan,
pegawai Badan Kebijakan Fiskal *)



Foto Ilustrasi
Arfindo Briyan

Sebagai salah satu negara terbesar di Asia, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen per tahun. Pada akhir 2017, beberapa lembaga *rating* juga menaikkan peringkat investasi Indonesia. Hal ini seiring dengan stabilnya kondisi makroekonomi dan kuatnya daya tahan ekonomi domestik dari goncangan eksternal.

Bukan hanya itu, Bank Dunia juga meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari posisi 91 (2017) menjadi 72 (2018). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia menjadi

lebih kondusif. Hal ini menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Namun di sisi lain, kinerja perekonomian Indonesia yang baik tersebut dinodai isu kesenjangan sosial. Rasio gini, rasio yang mengukur kesenjangan antara si kaya dan si miskin, cenderung meningkat dari 0.33 pada 2013 menjadi 0.39 pada 2017.

Hal ini mengindikasikan bahwa selisih pendapatan antara golongan masyarakat kaya dan miskin telah semakin lebar. Dengan kata lain, sebagian besar

manfaat dari aktivitas ekonomi dinikmati oleh masyarakat golongan atas.

Peran APBN

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Diantaranya dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendorong kesetaraan sosial, seperti program bantuan sosial dan subsidi.

Dalam APBN-P 2017, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp160 triliun untuk membantu masyarakat miskin melalui program sosial dan bantuan keuangan. Namun, dana APBN yang terbatas mendorong pemerintah untuk mencari sumber dana domestik lain yang sejalan dengan tujuan pemerintah.

Memberdayakan zakat

Salah satu sumber dana domestik yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia adalah zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Secara singkat, zakat dapat menjadi instrumen yang dapat memaksa seorang muslim, sehingga mereka memberikan sebagian hartanya untuk dikelola oleh lembaga zakat, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin. Sistem amal seperti ini sebenarnya tidak hanya ada di dalam agama Islam, tetapi juga agama lain, seperti

sepersepuluh untuk umat Kristiani dan *dana* untuk umat Hindu.

Potensi zakat Indonesia

Sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, Indonesia dapat mengeksplorasi manfaat zakat sebagai instrumen ekonomi. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, diketahui sebanyak 87.2 persen penduduk Indonesia atau lebih dari 200 juta orang memeluk agama Islam. Jumlah muslim yang berlimpah ini adalah faktor kunci yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan dana zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2012) mengestimasi bahwa potensi zakat mencapai 3.4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2010. Jumlah ini mencakup zakat rumah tangga, perusahaan, BUMN dan tabungan-deposito. Di samping itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp268 triliun dengan pertumbuhan hingga 58 persen pada tahun 2018. Potensi yang besar serta tren pengumpulan zakat yang terus meningkat menunjukkan bahwa dana zakat cukup signifikan dalam mendukung pemerintah mengatasi masalah sosial.

Praktik saat ini

Dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat bukan hanya untuk meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat, melainkan juga untuk membantu penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, program zakat juga diarahkan untuk kegiatan produktif, seperti mendorong mustahik (penerima zakat) untuk memulai usaha, sehingga mendapat penghasilan yang berkelanjutan.

Salah satu program yang dijalankan BAZNAS adalah *Zakat Community Development* (ZCD). Tujuan dari ZCD adalah untuk mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi melalui zakat sebagai sumber pembiayaan. Termasuk, mendorong pembangunan usaha yang memiliki nilai tambah.

Sebagai contoh, Enrekang, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, mendapat bantuan berupa sapi perah untuk 20 kepala keluarga. Selanjutnya, setiap 10 kepala keluarga dibina untuk memproduksi susu sapi dan diolah menjadi keripik dangke (keripik tradisional dengan rasa mirip keju).

Hasil penelitian

Penelitian oleh Beik dan Arsyianti (2016) menganalisis dampak program zakat yang berasal dari Dompot Dhuafa dan BAZNAS Jakarta di dua area, yaitu Kabupaten Bogor dan Jakarta. Dari hasil wawancara dengan lebih dari 200 responden, penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik sebesar 98,7 persen.

Selain itu, Ayuniyyah et. al (2017) juga menganalisis dampak program distribusi zakat dari BAZNAS di area yang lebih luas yakni Bogor, Depok, dan Sukabumi. Dengan

mengambil 1.309 sampel, penelitian ini menunjukkan bahwa setelah satu tahun menerima program zakat, Rasio Gini menurun 0.017 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat dapat memperbaiki masalah kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Kendala saat ini

Meskipun program zakat sejalan dengan program Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, optimalisasi dana zakat masih menghadapi kendala. Secara lebih khusus, kendala yang dihadapi terkait dengan kepercayaan publik.

BAZNAS mencatat bahwa pada 2016, dana zakat yang terhimpun sebesar Rp3.8 triliun atau hanya sekitar 3 persen dari potensinya. Hal ini mengindikasikan bahwa selisih antara realisasi dan potensi zakat masih sangat besar. Selanjutnya pada 2017, hanya terdapat 132 ribu pembayar zakat yang teregistrasi dalam sistem BAZNAS atau kurang dari 1 persen populasi muslim di Indonesia.

Melihat fakta yang terjadi, penelitian oleh Firdaus (2012) menyimpulkan bahwa sebagian besar muzaki (pembayar zakat) di Indonesia lebih suka membayar zakat ke institusi informal dan cenderung tidak percaya terhadap lembaga zakat formal. Hal ini cukup beralasan, sebab penelitian tersebut juga melihat adanya masalah di dalam organisasi pengelola zakat yang cenderung lemah dan kurang profesional dalam mengelola dana zakat.

Penelitian terkait praktik zakat di negara tetangga, rupanya tidak jauh berbeda. Ahmad (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan data primer untuk melihat pengaruh kepuasan pembayar

zakat terhadap program dari lembaga zakat. Hasilnya, 50 persen dari 753 responden di Malaysia merasa tidak puas dengan program zakat. Hal ini kemudian secara signifikan mempengaruhi preferensi mereka untuk membayar zakat di lembaga formal.

Studi lain juga mengatakan bahwa sebagian besar muzaki di Malaysia menganggap bahwa informasi atas distribusi zakat tidak jelas dan kurang lengkap. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi penyaluran dana zakat adalah keharusan guna menarik para muslim untuk membayar zakat melalui lembaga resmi.

Kepercayaan jadi kunci

Membangun kepercayaan dan menjalin hubungan baik antara pembayar zakat dan lembaga zakat menjadi faktor kunci dalam mendorong optimalisasi dana zakat di Indonesia. Selain itu, lembaga zakat perlu membangun citra positif untuk menarik para muzaki membayarkan zakatnya ke lembaga.

Melalui kemajuan teknologi, lembaga zakat bisa memanfaatkan jaringan internet guna membuat sistem yang terintegrasi ke semua pihak. Baik dari sisi muzaki, mustahik, maupun lembaga zakat. Dengan aplikasi yang mungkin dapat terhubung ke ponsel pintar (*smart phone*), publik dapat mengakses informasi mengenai zakat dan mengawasi programnya dengan mudah. Harapannya, sistem ini akan mendorong transparansi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola dana zakat.

Efisiensi dan edukasi

Hal penting lain yang perlu dilakukan lembaga zakat adalah mencari cara baru

untuk mengumpulkan zakat secara lebih efisien. Misalnya, menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan. Melalui bantuan lembaga keuangan, seperti bank syariah, proses transaksi pembayaran zakat maupun pencatatannya bisa lebih cepat dan efektif.

Adanya integrasi antara data muzaki yang telah terdaftar dengan data di perbankan, memungkinkan para muzaki memperoleh kemudahan guna mengatur dan menjadwalkan pembayaran zakatnya.

Hal yang tidak kalah penting, edukasi ke masyarakat akan manfaat membayar zakat di lembaga formal turut menjadi isu fundamental. Lembaga zakat perlu menggunakan cara kreatif untuk mengajak para muslim agar bersedia menyisihkan sebagian hartanya melalui lembaga zakat. Untuk saat ini, edukasi melalui media sosial bisa menjadi alternatif pilihan.

Kesimpulan

Secara umum, potensi dana zakat Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan. Namun, rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga zakat menjadi penghambat dalam mencapai pengumpulan zakat yang optimal. Untuk itu, diperlukan evaluasi dari tiap lembaga zakat di Indonesia. Dengan membayar zakat melalui lembaga formal, seorang muslim bukan hanya menunaikan kewajibannya, melainkan juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi nasional.

**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*



MAKE A
CHANGE
BY MAKING
THE CALL

Suara yang Anda bagi ke kami adalah suara seorang pemimpin yang menyuarkan kebenaran.

Setiap tahunnya kami berkomitmen menindaklanjuti ratusan laporan dari pegawai dan masyarakat terkait penyimpangan yang terjadi di Kementerian Keuangan. Kami meyakini bahwa kerahasiaan identitas pelapor seperti Anda begitu penting untuk terus ikut serta menjadi bagian dari transformasi Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi

www.wise.kemenkeu.go.id

Cita Tinggi Tentara RI

Indonesia tampaknya tidak pernah kehabisan pemuda-pemudi andalan. Yang bukan hanya cemerlang dalam karier, melainkan juga memiliki antusiasme tinggi dalam menempuh pendidikan. Adalah Rico Ricardo Sirait, satu diantaranya.

Karier yang baik sebagai seorang tentara tidak menghentikan keinginan Rico –demikian dia disapa– untuk terus belajar. Melalui seleksi beasiswa LPDP, Komandan Batalyon Armed 1/Roket Ajusta Yudha ini, berhasil merampungkan pendidikannya di negeri kangguru pada Program Master of Military and Defence Studies di Australian National University (ANU).

Batalyon Armed 1/Roket Ajusta Yudha merupakan satuan jajaran Resimen Armed 1 Divif 2 Kostrad yang bertempat di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebelum memegang amanah sebagai komandan batalyon di sana, Rico merupakan staf Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat yang berhubungan langsung dengan media.

Kaya Pengalaman

Sebelum menjalani pendidikan, Rico pernah ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Berbekal latihan dan pengalaman kursus Pasukan PBB di Mongolia, Bangladesh dan Indonesia, Rico yang pada saat itu bertugas sebagai Perwira Staf G-5/Plans Sector East, berhasil merampungkan tugasnya. Bahkan, ia meraih

penghargaan dari *Force Commander United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* dan Komandan Sektor Timur UNIFIL.

Di samping itu, Rico juga pernah terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan latihan penanggulangan bencana alam periode 2010-2011. Kegiatan tersebut diadakan di tingkat nasional hingga internasional yang melibatkan 27 negara di dunia. Keterlibatan Rico terjadi saat dirinya membantu staf operasi Mabes TNI bekerja sama dengan Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB). Hal ini menjadi dasar baginya dalam menyusun prosedur tetap (protap) dan aturan pelibatan sipil militer dalam manajemen penganggulangan bencana.

Ingin Damai, Bersiap Perang

Sebuah adagium latin yang cukup tersohor mengingatkan Rico akan motivasinya mendalami bidang militer dan pertahanan. *Si Vis Pacem Para Bellum*.

“Hal ini bermakna, saat ingin berdamai, maka bersiaplah untuk perang,” jelas pemuda kelahiran Jombang 39 tahun silam ini.

Adagium ini, menurut Rico, bersesuaian dengan fakta sejarah yang membuktikan bahwa pembangunan suatu bangsa harus selaras antara pembangunan ekonomi (fisik-nonfisik) dengan pembangunan pertahanan.

“Negara yang maju secara ekonomi perlu ditunjang dengan sektor pertahanan

yang kuat, agar dapat berdaulat secara utuh. Sementara itu, untuk membangun suatu bangsa yang maju dan besar, negara harus mampu menciptakan kedamaian dan keamanan bagi rakyatnya,” terangnya.

Menjatuhkan Pilihan

Saat menjatuhkan pilihan studi magister di ANU, Rico melakukannya dengan kemantapan hati. Alasannya, selain masuk sebagai jajarannya 50 universitas teratas, Rico meyakini ANU dapat memberikan pengetahuan di bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan profesi yang kini ia jalani. Terlebih, ANU berada di kawasan regional yang sama dengan Indonesia.

“Artinya mereka memiliki cara pandang geopolitik dan geostrategis yang sama terhadap perkembangan lingkungan strategis di wilayah ini,” ujarnya beralasan.

Melalui studinya, Rico memahami arti penting dari aspek geostrategi. “Termasuk, perspektif ancaman di kawasan Asia Pasifik yang dapat mempengaruhi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar suami dari Fitri Rahardja ini menjelaskan.



Rico bersama istri dan anak-anaknya saat wisuda.

Foto dok. pribadi.

Nilai Lebih

Merupakan suatu kebanggaan bagi Rico berkesempatan mengikuti seleksi beasiswa LPDP dan menjadi salah satu *awardee*.

“LPDP menyeleksi seluruh anak negeri dan meng-cover semua sektor pembangunan sosial yang sesuai dengan cetak biru rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang,” terangnya.

Rico melanjutkan, “Dengan beasiswa LPDP, mahasiswa Indonesia akan mampu berdiri dengan kepala tegak di seluruh universitas terbaik di dunia, serta tidak mesti tunduk terhadap syarat ketentuan yang diberlakukan ketika menerima beasiswa dari negara-negara sponsor maupun lembaga-lembaga internasional.”

Bercita Tinggi

Keseriusan Rico untuk terus belajar dan mengembangkan karier rupanya tidak

main-main. Di balik keseriusannya itu, tersemat cita-cita tinggi untuk berkontribusi bagi negeri.

“Menjadi Menteri Pertahanan RI merupakan cita-cita yang mendorong saya untuk membuat Indonesia menjadi negara yang semakin berdaulat dan kuat,” akunya.

Sebab menurutnya, kemajuan perekonomian Indonesia harus senantiasa dikawal dengan pembangunan pertahanan negara yang hebat. “Hal ini membuat Indonesia memiliki nilai tawar dan disegani oleh negara-negara maju di dunia,” papar Tentara dengan pangkat Letnan Kolonel Arm ini.

Hal itu pula yang menurut Rico mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. “Yaitu untuk menciptakan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” sebut Rico.

Tantangan

Selama menjalani pendidikan di Australia, Rico aktif mengikuti kegiatan dengan KBRI di Canberra. Hal ini sebagai bentuk pengabdian kepada perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Australia.

Hal yang tidak kalah penting bagi Rico adalah membangun hubungan interpersonal yang baik dengan mahasiswa-mahasiwi di sana. Sebab menurutnya, bukan tidak mungkin suatu saat mereka akan menjadi pemimpin strategis di masa depan.

Meski demikian, perbedaan kebudayaan menjadi tantangan tersendiri bagi Rico saat berinteraksi dengan masyarakat setempat.

“Hal ini cukup berbeda dengan budaya Amerika Serikat, tempat saya menempuh pendidikan sebelumnya. Sebagian besar masyarakat Australia memiliki kecenderungan memandang orang Asia berada pada strata sosial di bawahnya,” kenang pria yang menyelesaikan program sarjannya di Norwich University, Vermont Amerika Serikat ini.

Pesan

Keberhasilannya meraih beasiswa, diakui Rico, tidak lepas dari motivasi keluarga. Kini bersama sang istri yang berprofesi sebagai dokter kandungan dan kedua orang putra-putrinya, Rico yang telah menyelesaikan pendidikannya, menempati Asrama Militer Batalyon Armed 1/Roket di Malang. Rico sempat berpesan kepada para penerima beasiswa bahwa ada tanggung jawab moral yang perlu ditunaikan setelah menyelesaikan pendidikan.

“Wujudkan rasa syukur atas berkah menerima beasiswa dari negara melalui LPDP, dengan memberi pengabdian kembali kepada negara,” tutupnya mengingatkan.

Teks Farida Rosadi

Revolusi Industri 4.0 pada SDM Sektor Publik

Teks Pandu Rizky Fauzi,
Pegawai Sekretariat Jenderal



Ilustrasi
Dimach Putra

Pada tahun 2030 sebanyak 75 s.d. 375 juta pekerja di seluruh dunia akan terdampak proses otomatisasi dan digitalisasi yang sedang berlangsung. Demikian ungkap laporan McKinsey Global Institute, “*Job Lost, Job Gained: Workforce transitions in a time of automation*”, Desember 2017 lalu.

Istilah revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada “Hannover Fair” di Jerman tahun 2011. Saat itu diperkenalkan teknologi *cyber physical production systems (CPPS)*. Teknologi ini kemudian diadopsi oleh Pemerintah Jerman dengan tajuk “*Germany High-Tech Strategy 2020*” dan dijalankan dengan pembentukan Pokja “*industrie 4.0*”. Dari sinilah istilah revolusi industri 4.0 lalu mengemuka ke seluruh dunia.

Selain CPPS ada beberapa produk teknologi lain yang menandai bergulirnya revolusi ini. Misalnya, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, robot kolaboratif, *augmented virtual reality*, manufaktur aditif, komputasi awan,

analitik data besar, dan internet untuk segala.

Dampak

Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia, Professor Klaus Schwab dalam bukunya “*Revolusi Industri Keempat*” menyatakan, revolusi industri 4.0 memiliki skala, kompleksitas, dan cakupan yang berbeda dari revolusi industri generasi sebelumnya. Pengaruhnya akan sampai dengan bentuk, cara, dan kecepatan yang berbeda-beda.

Dampak tersebut tidak selalu negatif. Misal pada tahun 2008, ketika Steve Jobs membuka peluang para pengembang aplikasi di luar Apple untuk menciptakan aplikasi bagi iPhone. Siapa yang menyangka pengembang aplikasi akan menjadi pekerjaan baru yang tujuh tahun kemudian bernilai lebih dari 100 miliar dollar (Forum Ekonomi Dunia, 2016).

Lantas bagaimana dampaknya? Jika revolusi industri 4.0 hanya mengefisiensikan model bisnis yang ada tanpa memunculkan permintaan barang

dan jasa baru, maka harus dimitigasi karena berpotensi menciptakan efek disrupsi yang besar. Misalnya kemunculan usaha baru dengan pendekatan “*Lembah Silikon*” seperti Uber, Go-Jek, Airbnb, dan lain sebagainya bisa mematikan pemain lama seperti perusahaan taksi dan ojek pangkalan.

Sayangnya, bukti empiris terakhir mengindikasikan revolusi industri 4.0 memang menciptakan tenaga kerja baru yang lebih sedikit dibanding revolusi generasi sebelumnya. Ekonom Carl Benedikt Frey bersama pakar pembelajaran mesin, Michael Osborne, pada 2013 lalu telah menghitung kemungkinan komputer menggantikan peran manusia.

SDM Sektor Publik

Setidaknya ada tiga catatan jika dampak tersebut ditarik ke sektor publik di Indonesia. Pertama adalah jeda waktu. Mengingat penelitian di atas dilakukan di negara-negara maju dan berkonsentrasi di dunia bisnis, tentu akan ada jeda kapan

dampak tersebut dirasakan oleh aparatur sipil Indonesia. Bahkan di Indonesia masih ada yang belum merasakan manfaat dampak revolusi industri 2.0, dengan belum teralirinya listrik secara memadai pada 12.659 desa (Kementerian ESDM, 2016).

Kedua, melihat pola euforia di pemerintahan, revolusi industri 4.0 masih berpusat kepada perbaikan model bisnis. Tren tersebut terlihat dari berlomba-lombanya instansi pemerintah mengembangkan aplikasi layanan *online*. Sementara, belum banyak instansi mengidentifikasi peluang jabatan baru yang sebelumnya tak pernah ada di sektor publik.

Catatan ketiga, meskipun mengarah pada perbaikan proses bisnis, jumlah aparatur sipil nampaknya tidak serta merta terpangkas. Selain karena aspek regulasi, sifat pekerjaannya yang berbasis manusia menuntut manusia yang bertanggung jawab dan akuntabel dibalik setiap arus data dan dokumen.

Rekomendasi

Sebagai Kementerian yang terdepan dalam program reformasi dan transformasi kelembagaan, Kemenkeu perlu berperan aktif menentukan arah transformasi digital organisasi.

Pertama, dengan menguatkan inisiatif strategis Kemenkeu pada tema sentral. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.01/2018. Dalam hal ini, pembangunan *The Enterprise Architecture for Ministry of Finance (TEAM)* dan kajian pembentukan unit/tim yang bertugas menyiapkan transformasi digital Kemenkeu dapat diperkuat dengan memikirkan kembali SDM Kemenkeu 4.0. Tepatnya SDM seperti apa yang mampu mendukung Kemenkeu menjadi organisasi yang tangkas di era digital.

Kedua, mulai mengidentifikasi keahlian-keahlian yang dibutuhkan di masa depan dan celah yang ada sekarang. Tugas ini tidak ringan, mengingat negara-negara OECD pun masih

direkomendasikan untuk mengaudit kecakapan atau meninjau kemampuan yang ada. Dengan begitu, mereka dapat melacak dan memetakan kompetensi yang tersedia, di mana kompetensi tersebut tersebar dan belum tersebar, serta celah kompetensi apa yang ada.

Ketiga, menyiapkan porsi rumpun jabatan terkait TIK yang lebih banyak seperti yang dilakukan di negara maju. Misalnya Australia, pada tahun 2017, rumpun jabatan bidang ICT menduduki peringkat keempat terbesar (7.2 persen), setelah rumpun pelayanan (24.8 persen), regulasi dan kepatuhan (15.6 persen); dan rumpun administrasi (12.3 persen).

Keempat, meningkatkan program pelatihan dan budaya pembelajaran. Adanya identifikasi kekosongan keterampilan yang dibutuhkan, tentu akan memudahkan penyusunan program pelatihan. Penanaman belajar sebagai budaya organisasi menjadikan SDM Kemenkeu lebih peka terhadap dinamika perkembangan, termasuk teknologi.



Wajah Baru Tax Holiday

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 / PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Ilustrasi Dimach Putra

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan akan memberi insentif pajak yang lebih menarik bagi investor, dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Berbagai bentuk insentif pajak ditawarkan, salah satunya berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau yang lebih dikenal dengan *tax holiday*.

Tax holiday, seperti namanya: 'holiday', berarti wajib pajak (WP) diberi kesempatan untuk 'libur' dari kewajiban membayar pajaknya dalam jangka waktu tertentu. Indonesia sebenarnya telah memberlakukan kebijakan ini sejak tahun 1967 melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* UU Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman

Modal Asing (PMA). Berdasarkan aturan tersebut, PMA dapat memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Perseroan sebesar 50 persen selama lima tahun. Namun, dalam masa pemberlakuannya, fasilitas ini dinilai kurang menarik, sehingga kebijakan *tax holiday* tersebut dicabut bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983.

Namun demikian, sejalan dengan penerbitan UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kebijakan *tax holiday* kembali diterapkan dengan rezim yang baru. Berdasarkan aturan tersebut, *tax holiday* hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Ketentuan mengenai *tax holiday* ini lebih jauh diatur di dalam PMK.

Tahun 2011, pemerintah menuangkan kebijakan *tax holiday* dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 130/PMK.011/2011 dan diperbarui pada tahun 2015 dengan PMK nomor 159/PMK.010/2015 jo. PMK 103/PMK.010/2016. Di

tahun 2018, kebijakan *tax holiday* kembali diperbarui dengan penerbitan PMK nomor 35/PMK.010/2018.

Aturan Lama Sepi Peminat

Berdasarkan ketentuan PMK 130/2011 dan PMK 159/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 103/2016, kebijakan *tax holiday* di Indonesia tidak mengatur secara jelas persentase pengurangan PPh dan jangka waktu yang akan diperoleh investor. Peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa pengurangan yang dapat diperoleh berkisar antara 10 persen sampai dengan 100 persen. Sedangkan untuk jangka waktu pengurangan yang diberikan hanya diatur selama kurun waktu 5 sampai dengan 15 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan. Dengan demikian, apabila investor datang ke Indonesia dan berminat berinvestasi dengan mendirikan industri yang masuk dalam kategori pionir, ia tidak dapat mengetahui secara pasti berapa persen pengurangan pajaknya dan berapa lama jangka waktu yang akan diperoleh.

Ketidakpastian tersebut yang membuat fasilitas ini menjadi sepi peminat. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, tercatat hanya ada 5 perusahaan yang berhasil mendapatkan fasilitas ini. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tidak ada satupun investor yang mengajukan permintaan fasilitas *tax holiday*.

Selain faktor ketidakpastian dalam pemberian fasilitas, investor juga mengeluhkan prosedur yang rumit. Untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday*, investor harus melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, melibatkan banyak kementerian/lembaga, dan memakan waktu hingga berbulan-bulan. Oleh karena

itu, pemerintah berinisiatif melakukan perubahan skema pemberian fasilitas *tax holiday*.

Aturan Baru Lebih Menarik

Pemerintah menawarkan skema baru pemberian *tax holiday* yang lebih menarik melalui penerbitan PMK 35/2018. Skema baru tersebut mengubah persentase pengurangan pajak yang sebelumnya diatur dalam *range* 10-100 persen, menjadi *single rate* 100 persen. Sedangkan untuk jangka waktu pemanfaatan fasilitasnya, peraturan tersebut juga mengubah dari jangka waktu pengurangan pajak antara 5-20 tahun menjadi jangka waktu pengurangan pajak yang disesuaikan dengan nilai investasinya. Sebagai contoh, jika nilai investasi yang diberikan berkisar antara Rp500 miliar sampai dengan Rp1 triliun, maka jangka waktu pengurangan pajak yang dapat diberikan adalah selama 5 tahun. Contoh lainnya, jika nilai investasi yang diberikan berkisar antara Rp15 triliun sampai dengan Rp30 triliun, maka jangka waktu pengurangan pajak yang dapat diberikan adalah selama 15 tahun.

Selain itu, PMK ini juga menyederhanakan prosedur permohonan fasilitas *tax holiday*. Dalam permohonan fasilitas *tax holiday*, WP dapat menyampaikan permohonannya melalui *online system* yang disediakan oleh BKPM. Apabila memenuhi kriteria, maka permohonan tadi akan diajukan BKPM kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan akan memberikan keputusan dalam waktu lima hari kerja.

Trust and Verify

Pengaturan *tax holiday* yang baru mengedepankan prinsip "trust and verify". Pemerintah menawarkan kemudahan bagi calon investor untuk mendapatkan fasilitas perpajakannya. Prosedur

permohonan fasilitas tersebut dibuat lebih sederhana dan proses penetapan pemberian fasilitasnya pun dipersingkat hingga hitungan hari. Namun, pemerintah juga tetap tidak lupa mempersiapkan langkah preventif untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas yang telah diberikan, seperti aksi *tax planning* yang agresif.

Kemudahan prosedur ini tidak terlepas dari mekanisme *post-audit* yang kuat. Sebelum memanfaatkan fasilitas tersebut, WP harus mengajukan permohonan pemeriksaan untuk menentukan kapan saat **dimulainya** pemanfaatan fasilitas **yang diterimanya**. Pemeriksaan akan dilakukan oleh **Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak**. Apabila, dari hasil pemeriksaan, diketahui besaran realisasi nilai investasi tidak sesuai dengan rencana awal, maka jangka waktu *tax holiday*-nya akan disesuaikan. Selain itu, apabila diketahui realisasi nilai investasinya kurang dari Rp500 miliar atau realisasi kegiatan usahanya tidak sesuai dengan perencanaan, maka fasilitas *tax holiday* tersebut akan dicabut.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan insentif pajak berupa *tax holiday*, pemerintah berharap dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Peningkatan aliran investasi yang masuk ke dalam negeri diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, menyerap tenaga kerja, mengisi kekosongan rantai industri, dan meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Pemerintah juga berharap, fasilitas *tax holiday* yang diberikan dapat dimanfaatkan sektor industri yang dianggap memiliki *multiplier effect* yang besar, khususnya sektor industri hulu.

Teks Sri Rejeki Prasasti, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal

Menumbuhkan Cita-Cita

Tidak ada alasan untuk tidak bermanfaat bagi orang lain, meski hanya dengan sedikit tenaga dan sekejap waktu. Ialah Sarjono, yang selama ini berada di zona nyaman sebagai aparatur sipil negara. Kemudian tersentak saat menyadari masih banyak saudara di tempat lain yang membutuhkan perhatian dan sentuhan dari sesama.

Keikutsertaannya dalam AsiaWorks Leadership Program di Jakarta pada tahun 2013 menjadi pemicu. Salah satu kegiatannya adalah *community service*, yang dilakukan perorangan dan kelompok. Panti asuhan di dekat tempat tinggalnya dijadikan lokasi *community service* perorangan. Seminggu sekali ia datang membantu pengurus panti membimbing anak-anak menyelesaikan tugas sekolah. Sedangkan yang dilakukan secara berkelompok, disepakati di kampung pemulung Pancoran, kawasan yang dihuni ratusan pemulung dengan keluarga masing-masing, tak jauh dari kawasan elit Pancoran di Jakarta Selatan.

Di Pancoran, ia dan kelompoknya menghidupkan kembali taman bacaan dengan renovasi bangunan yang hampir roboh, menambah alat peraga pendidikan, juga menambah koleksi buku bacaan. Juga mengajak 50an anak-anak pemulung setempat untuk tetap merangkai cita-cita, dan bermain ke Kidzania, sebuah wahana permainan modern yang tidak pernah terbayang sebelumnya di benak warga pemulung Pancoran.

Yang membedakan kegiatan tersebut dengan kegiatan lain sejenis adalah cara mendapatkan dana dan barang kebutuhan lain. Para peserta pelatihan diminta untuk sebanyak mungkin mengajak orang lain agar mau terlibat dan mendukung kegiatan mereka. Dan terbukti, *experience* berhubungan dengan banyak pihak berbeda, merasakan berhasil, merasakan ditolak, dan mengalami gagal menjadi pelajaran berharga yang tidak ditemukan di pelatihan lain.

“Ada rasa kebahagiaan tersendiri saat kita bisa berguna, bisa memberdayakan orang lain” ucap ayah tiga putra satu putri ini. Waktu dan tenaga yang diberikan tak sebanding dengan senyum bahagia anak-anak dan pengurus panti, cerianya anak-anak pemulung mengunjungi tempat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, juga raut kebahagiaan para pemulung yang menyaksikan anak-anak mereka bangkit dan percaya diri lagi untuk mempunyai cita-cita.

Cara ini juga digunakan untuk mendidik buah hatinya sendiri. Di saat-saat tertentu, mereka diajak mengunjungi panti asuhan atau komunitas lain yang tidak seberuntung mereka. Juga dengan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan serupa yang masih sering dilakukan di lokasi lain. “Lihatlah nak, rasakan.. tidak semua anak seberuntung dirimu yang memiliki ayah dan ibu, tidak semua anak mempunyai kesempatan belajar dan bermain sama banyak dengan yang kamu miliki, rasakan...,” ujarnya.



Kegiatan bermain dan belajar bersama anak-anak buruh pemetik daun teh di Cikoneng, Puncak, Bogor.

Foto dok. pribadi

Kebahagiaan saat berbagi

Kecintaannya terhadap kegiatan sosial sudah terasah sejak di bangku perkuliahan. Selama menjalani kuliah Program Diploma III Kebendaharaan Negara di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ia bergabung dengan STAPALA (Mapala nya STAN). Sampai saat ini, STAPALA adalah partner Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila banjir melanda Bintaro dan sekitarnya. Dengan mendayung perahu karet, ia dan tim mengevakuasi warga yang terjebak dan mendistribusikan bantuan bagi korban banjir.

Setelah lulus dari STAN tahun 1997, Sarjono ditempatkan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bantaeng, Sulawesi Selatan, hingga tahun 2004. Di tempat itu pula, ia diajak tokoh masyarakat setempat untuk mendirikan dan mengelola Loka Camp, wisata *outdoor activity* pertama di Sulawesi Selatan.

Rekan-rekan kantor pun pernah diajak untuk mengunjungi dan berbagi ke panti sosial tunaganda di Cimanggis, Depok. Tunaganda adalah penderita lebih dari satu kekurangan, fisik maupun mental. “Saat itu saya tidak melihat dan tidak pula merasakan aroma birokrasi, dari direktur sampai pelaksana semua hanyut dalam suasana di panti, mendengarkan celoteh anak-anak yang kurang beruntung, nyuapin orang yang tidak punya tangan dan kaki, mengganti popok bayi yang disia-siakan orang tuanya,.... teman-teman banyak yang menitikkan air mata, bahkan ada yang melakukannya lagi di kesempatan lain, baik sendiri ataupun dengan kelompok yang lebih kecil,” jelasnya.

Pria kelahiran 1977 yang saat ini mengabdikan diri di Direktorat Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ini berharap, Kementerian Keuangan mendukung penuh kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Kemenkeu

Mengajar. Dengan potensi sumber daya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, masih banyak aktivitas lain yang dapat dikerjakan para pegawai Kemenkeu selain mengajar. “Saya khawatir, rutinitas birokrasi kantor yang tidak dijaga keseimbangannya akan membunuh kreativitas pegawai.”

Belajar dari alam

Kecintaannya pada alam didasari oleh pengalaman masa kecil di Boyolali, Jawa Tengah. Sebagai anak seorang petani, sawah dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Di SMA pun, ekstra kurikuler pecinta alam dipilih dibanding kegiatan lain yang lebih *ngetrend* saat itu. Pengalaman menyenangkan itulah yang ingin ia tularkan kepada si buah hati. “Saya membiasakan anak-anak untuk bermain di alam bebas atau mengunjungi saudara di waktu libur, daripada mengajak mereka ke mall,” ujarnya dengan tersenyum.

Belum lama ini, bersama STAPALA ia bermain dan belajar dengan anak-anak buruh pemetik teh di Cikoneng, Bogor. **Petik Ilmu Seduh Cita-cita**, memberdayakan anak-anak yang akses ke sekolah formal nya dibatasi jarak dan biaya. “Biasanya, kendala kegiatan sosial seperti ini adalah *suistainability*, tidak gampang untuk *me-maintenance* semangat kawan-kawan yang baru terlibat pertama kali. Untuk Cikoneng kami kirim *volunteer* ke lokasi dengan jadwal rutin, beberapa anak potensial kami jadikan *role model*, semoga dengan itu anak-anak tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita masing-masing,” terang Dosen NIDK di PKN STAN ini.

Terakhir, pria yang acap kali terlibat dalam berbagai pelatihan kepemimpinan ini berharap, “Saya *ingin* jadi *trainer*, karena *trainer* itu tentang memberdayakan orang, bukan mengumpulkan honor.”

Teks Pradany hayyu

Ramadan Mengajarkan

Hari masih pagi. Namun jalan tidak pernah berhenti dijejali kendaraan para pencari rejeki. Selain kantuk yang masih terasa, ada hal berbeda yang saya rasakan dari biasanya. Wajah-wajah teduh nampak pada sebagian besar orang yang saya temui. Ritme dan air muka yang lebih tenang dari biasanya. Ya, barangkali, karena ini adalah pagi Ramadan.

Ramadan hadir satu kali saja, pada setiap tahun yang kita lewati. Ia istimewa. Sebab meski waktunya terbatas, namun kebaikannya melebihi keterbatasan waktu yang ia punya. Pada tiap kebaikan yang kita lakukan, walau tampak tidak seberapa, Sang Maha menjanjikan melipatgandakan nilainya. Bahkan, melebihi ekspektasi kita, manusia.

Sayangnya, sebagian besar dari kita seringkali alpa pada hal-hal berharga. Kecuali, hingga ia benar-benar pergi. Kealpaan ini umumnya timbul karena kurangnya ilmu dan pemahaman kita, atau tersebut pada sikap tidak acuh kita yang berujung melalaikan.

Padahal, terdapat banyak keutamaan Ramadan yang bisa kita raih dan perjuangkan, di samping menahan lapar dan dahaga. Dalam hari-hari Ramadan, kita perlu memastikan ada kebaikan yang tidak kita lewatkan. Pada langkah kaki, pada pandangan mata, serta pada kecenderungan hati.

Ramadan mengajarkan kita untuk kembali pada Alquran. Sebab pada bulan ini, Alquran diturunkan. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa Ramadan kali ini benar-benar mampu mendekatkan kita pada Alquran. Sebab, jika bukan di bulan ini, maka bulan mana lagi yang mampu menggerakkan kita membaca dan mengkaji Alquran?

Ramadan mengajarkan kita lebih peka untuk berbagi. Sebab anjuran bersedekah pada bulan ini begitu utama. Sebagian besar dari kitapun merasakan, bahwa Ramadan menjadikan tangan dan hati kita lebih ringan untuk bersedekah, membantu mereka yang membutuhkan.

Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas. Bahwa setiap amalan yang kita lakukan bukan dikarenakan orientasi dunia melainkan balasan di akhirat. Juga bukan karena berharap



Foto
ilustrasi
Anas Nur
Huda

pujian. Terlebih pada manusia, yang sama-sama saja kondisinya, sama-sama diuji dan perlu mempertanggungjawabkan setiap tingkah dan lakunya.

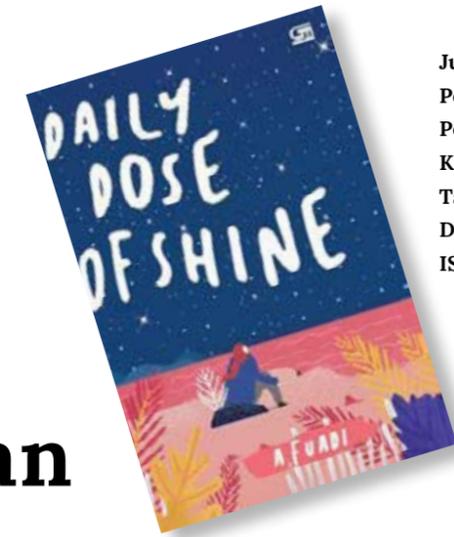
Ramadan juga mengajarkan bahwa azan solat begitu dinanti. Ia menjadi waktu rehat yang paling membahagiakan. Terlebih pada azan Maghrib yang menjadi penanda, bahwa pada hari itu, kita telah menunaikan ketaatan dengan penuh perjuangan.

Kita tentu berharap, Ramadan kelak mampu menjadikan kita sebagai orang yang bertaqwa. Yaitu mereka yang laiknya berjalan di antara duri-duri, sehingga pada tiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, khawatir kaki terluka karenanya.

Maka, semoga Ramadan kali ini, kita bisa menjadi pribadi taqwa. Yaitu pribadi yang senantiasa menajamkan pikiran, menahan diri pada yang terlarang, memperhatikan sekitar, dan mencari jalan paling selamat, hingga kelak bertemu dengan Sang Maha, *Ilaahi Robbi*.

Teks Farida Rosadi

Saatnya Optimisme Menjadi Dosis Harian



Judul : Daily Dose of Shine
Pengarang : Ahmad Fuadi
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : Mei 2018
Deskripsi Fisik : 142 halaman
ISBN : 9786020385365

Pernahkah terpikir pribadi ini perlu di-charge dengan energi positif yang dapat membuat hati bahagia dan bersemangat dalam bekerja. Sebuah kalimat ataupun syair seringkali mampu menggugah banyak manusia. “Daily Dose of Shine” ini penuh kata-kata mutiara yang bisa jadi mood booster untuk membuat para pembaca selalu optimis.

Membaca buku ini sedikit mengingatkan saya akan novel trilogi karya Ahmad Fuadi. Sejak novel perdana “Negeri 5 Menara terbit”, kalimat “man jadda wajadda” (siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil) menjadi sangat populer. Bahkan tak jarang acap kali dijadikan status para warganet di media sosial. Bahkan ada yang sampai menulisnya di kendaraan umum, truk pengangkut barang, produk kemasan makanan, sampai ilustrasi kaos. Karena kalimat seperti ini bisa bikin semangat naik berkali-kali lipat dan sangat mudah untuk diingat.

Dalam novel *bestseller* sebelumnya, penulis selalu menyertakan satu kalimat pembawa semangat yang menjadi ruh cerita. “Man jadda wajadda” ada di “Negeri 5 Menara”, “Man shabara zhafira” (siapa yang bersabar maka akan beruntung) di novel “Ranah 3 Warna,” serta “Man saara ala darbi washala” (siapa yang berjalan

di jalannya, akan sampai di tujuan) di novel “Rantau 1 Muara.” Tiga kalimat ini saja telah membuat entah berapa ribu pembaca tertularkan semangatnya. Begitu pula di buku “Daily Dose of Shine”, penulis memilihkan beberapa puluh kalimat lain yang dijamin mampu membuat pembaca menjalani hidup dengan optimis, bersyukur, dan penuh rendah hati.

Sayangnya, penulis kurang menceritakan makna dari setiap kalimat-kalimat dalam bentuk cerita inspiratif yang dinanti dari novel sebelumnya. Tiap lembar halaman hanya berupa kalimat-kalimat motivasi yang bisa pembaca dapatkan lewat internet ataupun buku serupa dalam pepatah Arab. Untungnya, *work of art* untuk konten visual ini sangat menonjol dan kuat karakteristiknya dengan penulis yang mengusung tema inspirational (pengembangan diri) pada setiap bukunya.

Buku ini sangat cocok bagi pembaca yang suka dengan bacaan ringan, kalimat pendek, dan langsung dapat dibagikan sebagai *daily quotes* kepada pembaca lainnya lewat unggahan sosial media. Penulis juga mengajak serta pembaca untuk membagikan foto *capture* halaman buku dan mengunggahnya di media sosial dengan tagar #dailydoseofshine.

Peresensi: Krishna Pandu Pradana



Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan
dan Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda I Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat



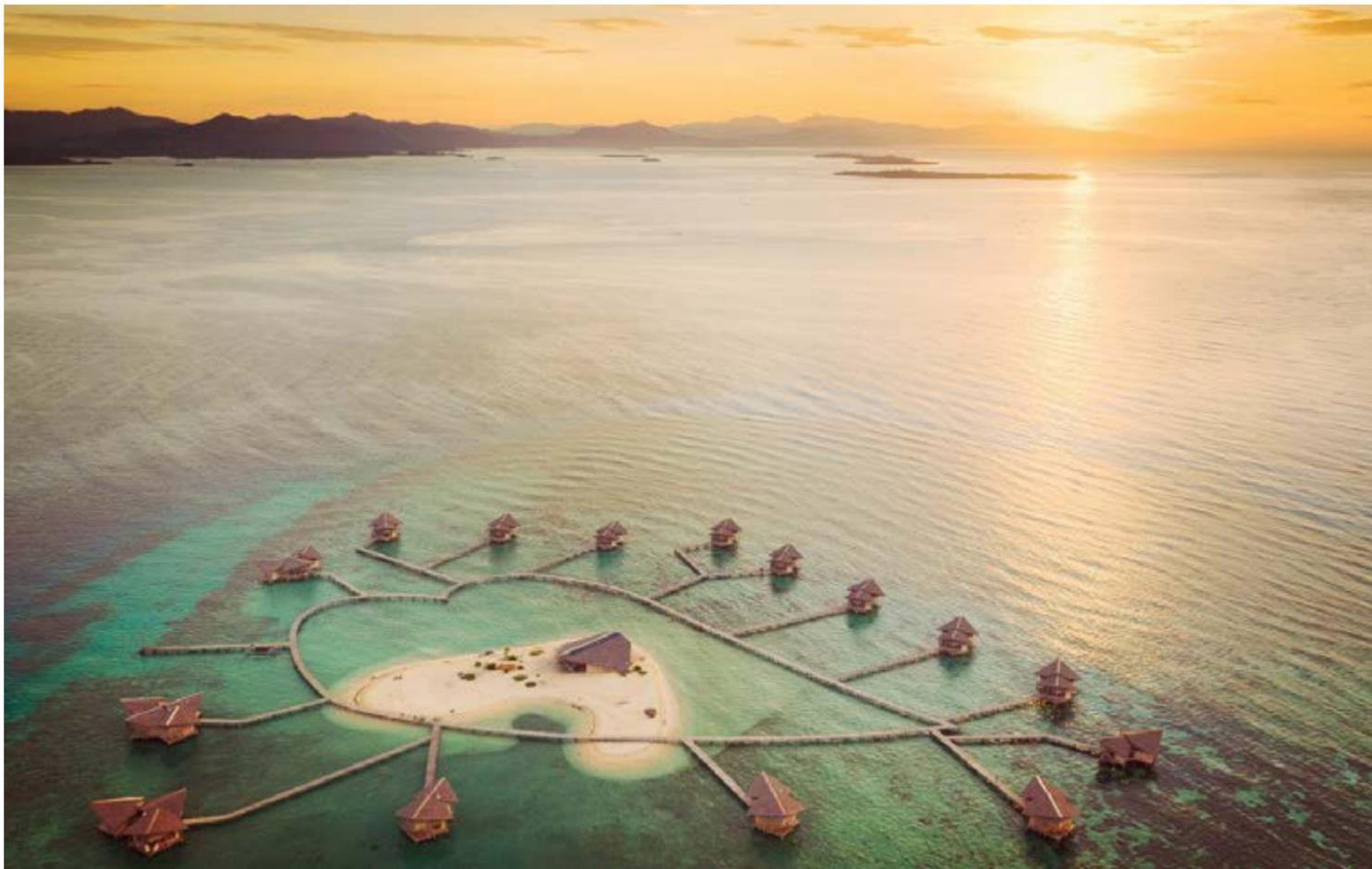
www.perpustakaan.
kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 Ubur Ubur Lembur Raditya Dika
- 2 Aroma Karsa Dewi Dee
- 3 Sirkus Pohon Andrea Hirata
- 4 Yang Fana Adalah Waktu Damono Sapardi Djoko
- 5 Pulang Tere Liye

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 Digital Mindset Carol Ingley
- 2 Corporate University Satrijono Wisnoe
- 3 Berteman dengan Demam dr. Arifianto
- 4 Ensiklopedia Leadership Muhammad Syafii Antonio
- 5 KerDJA Direktorat Jenderal Anggaran



Menghapus Penat di Pulo Cinta

Air adalah satu unsur maha penting bagi kehidupan. Wilayah nusantara kita juga didominasi oleh perairan. Jika berbicara mengenai air dan pantai, wilayah timur Indonesia adalah gudangnya. Pulau Sulawesi tidak usah ditanya lagi. Dari Wakatobi hingga Bunaken memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing.

Gorontalo, provinsi di Sulawesi yang baru berusia 10 tahun saat sedang galak-galaknya menggenjot ekonomi melalui sektor pariwisata. Menjadi provinsi muda tidak membuat Gorontalo berhenti untuk berkreasi menciptakan sesuatu yang menarik wisatawan.

Gorontalo memang terkenal dengan pulau-pulainya yang cantik. Diantaranya, satu pulau yang disebut Pulo Cinta. Pulau ini terletak di Kabupaten Boalemo yang berjarak 30km dari bandara Djalaludin Gorontalo atau sekitar 3 jam berkendara dari pusat kota.

Menurut legenda penduduk sekitar, Pulo Cinta merupakan tempat pelarian pangeran Gorontalo dan putri saudagar Belanda untuk bertemu dan menikmati hamparan bintang bersama kala malam datang. *It's a secret escape.*

Semula, Pulo Cinta tidak berpenghuni. Namun kemudian pulau ini dikembangkan menjadi sebuah resor ramah lingkungan (*eco-resort*). Lokasi ini sering disebut Maldives-nya Indonesia. Tak heran, sebab pemandangannya memang menakjubkan. Bangunan-bangunan resor yang ada di sini dihubungkan dengan jembatan yang membentuk hati sebagai lambang cinta.

Meski belum masuk dalam program 10 “Bali Baru” yang dicanangkan Kementerian Pariwisata, namun Pulau Cinta banyak menjadi bahan perbincangan segala kalangan. Sebab, pengelola gencar melakukan promosi melalui Instagram. Para anak muda berlomba-lomba mengunggah setiap sisi kemolekan Pulo Cinta versi mereka. Seperti wabah, pengunjung Pulo Cinta pun meningkat drastis karena sosial media yang didesain seperti album foto digital.

Panorama yang ditawarkan di Pulo Cinta sungguh menakjubkan. Mulai dari saat berjalan pada geladak kayu yang berbentuk hati, hingga saat bersantai di pondok di tepi pantai. Pasirnya putih dengan air warna hijau toska. Pada setiap

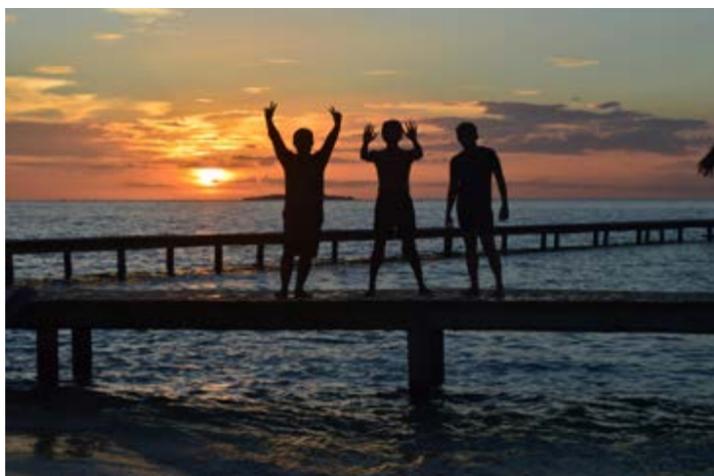
pondok terdapat teras untuk berjemur. Saat di teras sesekali tengoklah ke bawah. Jika beruntung, kita bisa melihat bintang laut bertebaran mengisi indahnya air laut yang bening bak kaca.

Jangan lewatkan *snorkeling* di sekitar pulau untuk melihat warna warni terumbu biota laut lainnya yang masih utuh. Tak ada salahnya mencoba menyelam jika hendak melihat bunga raksasa versi bawah air yang bernama *salvador dali*. Bunga karang ini memiliki ukiran indah di permukaannya, menyerupai lukisan Salvador Dali, perupa asal negeri Spanyol. Uniknya *Salvador Dali* Sponge hanya tumbuh di Gorontalo dan belum ditemukan di tempat lain di dunia.

Menikmati lukisan Tuhan dikala matahari terbenam bisa membuat kita hanyut pada suasana romantik di tempat ini. Kala malam datang, bukan berarti kita tak bisa melakukan apa-apa. Nikmati gelapnya langit bertabur bintang. Iringan deburan ombak seolah membius dan membawa kedamaian hingga membuat enggan beranjak.

Pulo cinta kini menjadi salah satu ikon pariwisata terbaru Gorontalo. Berkat sedikit kreativitas dan keseriusan Pemerintah Daerah, hamparan pasir putih yang kosong disulap menjadi tempat relaksasi turis domestik maupun mancanegara. Umumnya, pengunjung datang untuk mencari ketenangan dan melupakan kepenatan aktivitas sehari-hari.

Teks dan foto Herlambang Suko Prayogi, Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Keindahan Pulo Cinta



Membangun Karakter Lewat Komik

Foto
Resha Aditya
Pratama

Kreator karakter komik Si Juki yang akrab dipanggil Faza Meonk ini mencintai komik sejak kecil. Ia terbiasa membaca cerita bergambar dan komik anak-anak yang diberikan oleh orang tua. Sejak saat itu, ia mulai bercita-cita untuk menjadi komikus meski kebanyakan orang lain bercita-cita menjadi dokter atau guru.

Pada tahun 2010, Faza memanfaatkan sosial media sebagai media pengenalan karakter Si Juki kepada masyarakat. Menurutnya, era digital yang berkembang saat ini sangat membantu para komikus untuk mendapatkan segmen pembacanya. Ia melihat potensi besar di dunia komik karena sosial media telah mampu melahirkan komik-komik digital yang membuat akses pembaca menjadi lebih mudah.

Faza mulai serius bergelut di dunia komik sejak tahun 2012. Ia menginvestasikan waktu dan kreativitasnya untuk membuat komik. Media sosial Facebook menjadi salah satu media yang

membuat komik karyanya dapat dikenal oleh banyak orang.

“Saya pertama kali membuat komik gratisan di media sosial. Saya tidak apa-apa tidak dibayar asalkan komik saya dikenal banyak orang. Istilahnya kita membangun *awarness*-nya dulu agar orang-orang tahu. Orang udah kenal, orang udah suka, maka mereka akan mau membeli produk kita,” ujarnya.

Komikus pecinta kucing ini tidak berhenti pada sebuah karya cetak saja, namun ia juga mengikuti perkembangan zaman yang kekinian. Melihat media sosial *Youtube* berkembang pesat karena aspek audio visualnya, Faza pun mencoba memasukan Si Juki ke dalam karakter animasi yang bisa dinikmati oleh penonton *Youtube*.

Selain itu, Faza juga mempunyai sebuah industri kreator bernama *Pionicon*. Ia banyak melakukan riset bagaimana industri kreator di luar negeri mengatur kreator karakter sehingga bisa melahirkan karya-karya yang berkualitas. Jika berkaca dari

industri karakter yang ada di luar negeri seperti Jepang atau Hollywood, mereka mempunyai industri khusus yang mengorganisasi lisensi karakter-karakter yang dibuat oleh para kreatornya.

Di Indonesia banyak kreator yang berkualitas, serta *publisher*, dan pembuat film yang mumpuni. Namun, sayangnya tidak ada yang menghubungkan mereka. Faza menuturkan sejatinya para kreator di Indonesia hanya membuat karya namun tidak tahu cara menjualnya. Oleh karena itu, *Pionicon* muncul untuk menjadi jembatan para kreator serta industri kreatif.

“Di Indonesia, kesadaran bisnis IT masih rendah. Karakter-karakter itu sebenarnya membuat nilai tambah ekonomi bagi produk-produk yang ada. Misalnya sebuah gelas yang bergambar Doraemon akan dibeli, padahal kita sudah mempunyai gelas di rumah. Alasannya karena gelas itu bergambar karakter Doraemon yang kita suka. Jadi hal ini bisa membuat kreatif ekonomi kita meningkat,” ungkapnya.



Teks Abdul Aziz

Mas Praim

Cerita : Dimach Gambar : Bimo Adi



Saatnya Kembali Suci

**Selamat Hari Raya Idul Fitri
1439 Hijriah**



Foto
Muhammad Fath



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**